

**ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH
DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

NAMA : ZAINAB
NOMOR MAHASISWA : 177121019
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Tesis ini yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”** Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang administrasi.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH, MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si. selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

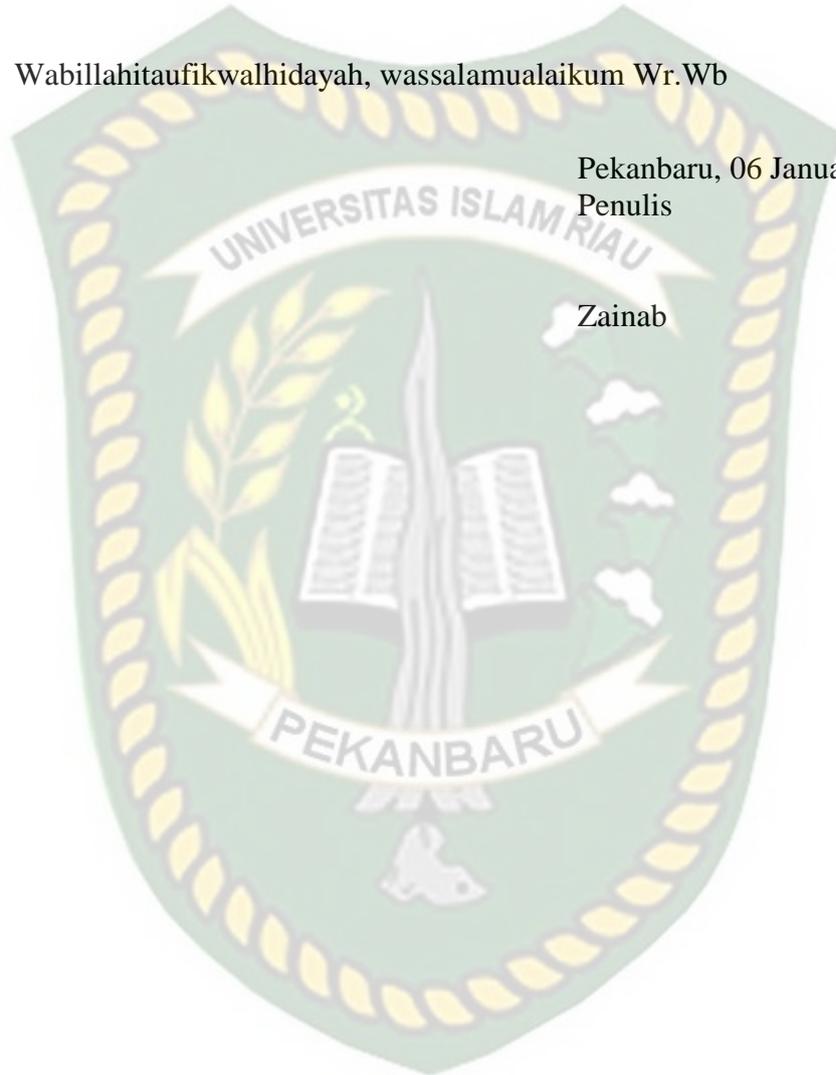
Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 06 Januari 2020

Penulis

Zainab



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	13
1.3.Tujuan Penelitian	13
1.4.Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	15
2.1. Tinjauan Pustaka	15
2.1.1. Konsep Administrasi	15
2.1.2. Konsep Organisasi.....	18
2.1.3. Konsep Manajemen.....	22
2.1.4. Konsep Kebijakan	24
2.1.5. Konsep Implementasi Kebijakan.....	28
2.1.6. Konsep Pengelolaan	30
2.1.7. Konsep Sampah.....	33
2.2. Kerangka Pemikiran.....	39
2.3. Penelitian Terdahulu	45
2.4. Konsep Operasional	52
2.5. Operasionalisasi Variabel.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1. Tipe Penelitian.....	56
3.2. Lokasi Penelitian	56
3.3. Informan Penelitian	56
3.4. Jenis dan Sumber Data	57
3.5. Teknik Pengumpulan Data	58
3.6. Teknik Analisa Data.....	59
3.7. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	60
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	62
4.1. Kabupaten Bengkalis.....	62
4.2. Kecamatan Mandau.....	71

4.3. UPT Pengelola Sampah di Kecamatan Mandau 74

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 79

5.1. Identitas Informan 79

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Analisis Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis..... 81

BAB VI PENUTUP 128

6.1. Kesimpulan..... 128

6.2. Saran..... 129

DAFTAR KEPUSTAKAAN 131



DAFTAR TABEL

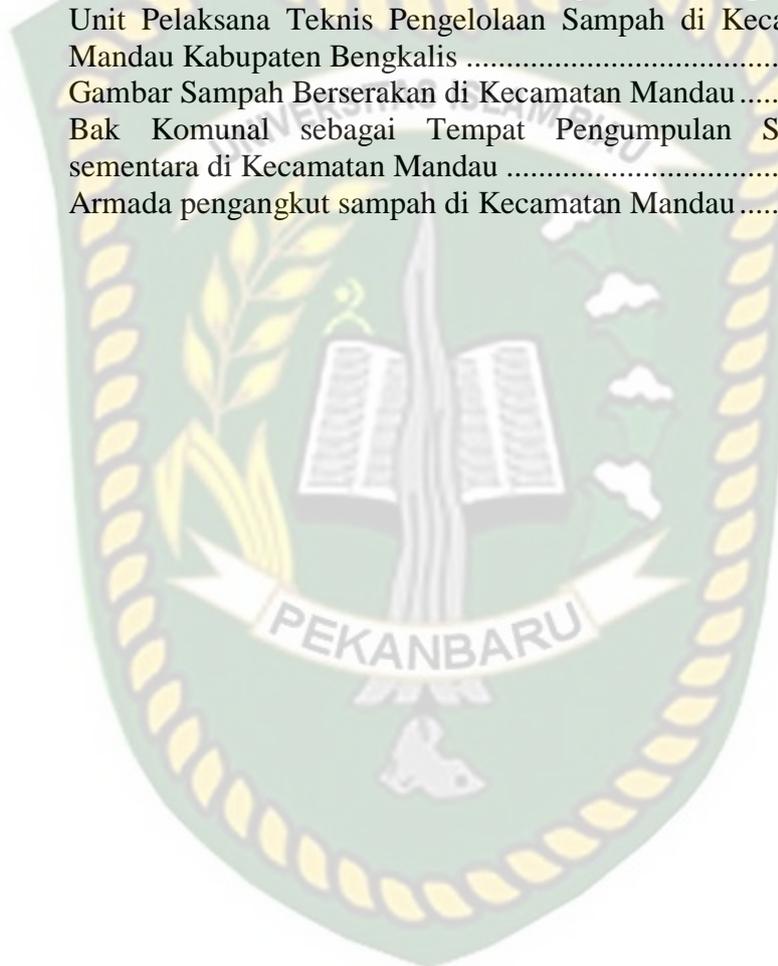
Tabel		Halaman
I.1	Data Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Mandau Tahun 2018.....	9
I.2	Data Armada Pengangkut Sampah yang berada di Kota Duri Kecamatan Mandau.....	10
I.3	Jam Kerja dan Rute Pengangkutan Sampah di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	11
II.1	Penelitian Terdahulu tentang Analisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	46
II.2	Operasionalisasi Variabel Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	55
III.1	Jumlah Informan Pada Penelitian.....	57
IV.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis	65
IV.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.....	68
IV.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2019.....	70
IV.4	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau, 2019.....	72
IV.5	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Mandau, 2014-2019	73
V.1	Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	79
V.2	Jumlah Informan Berdasarkan Umur	80
V.3	Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	80
V.4	Data Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Mandau Tahun 2018.....	104
V.5	Data Armada Pengangkut Sampah yang berada di Kota Duri Kecamatan Mandau.....	110
V.6	Jam Kerja dan Rute Pengangkutan Sampah di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.....	6
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	45
V.1	Gambar Sampah Berserakan di Kecamatan Mandau	100
V.2	Bak Komunal sebagai Tempat Pengumpulan Sampah sementara di Kecamatan Mandau	103
V.3	Armada pengangkut sampah di Kecamatan Mandau	111

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH DIKECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

Oleh

ZAINAB

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota – kota besar. Kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana–mana. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit, sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk. Masalah sampah yang timbul di Kota Duri adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun sampah kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman penduduk, karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur akan mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola Sampah Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif dan teknik triangulasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau sebagai *key informan*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sangat perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi berdasarkan indikator Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan Akhir.

Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan Akhir

WASTE MANAGEMENT ANALYSIS IN WASTE MANAGEMENT TECHNICAL UNIT IN MANDAU DISTRICT, BENGKALIS DISTRICT

ABSTRACT

By

ZAINAB

Garbage is one of the environmental problems that has not been handled properly, especially in big cities. The ability of the waste manager to handle waste is not in balance with its production, so garbage piles up everywhere. Waste that is not properly managed will cause a decrease in health and environmental aesthetic value due to water, air pollution and the development of pests, so that the settlements around the garbage pile are no longer suitable for residents. The waste problem that arises in Duri City is due to the difficulty of collecting, transporting, disposing, utilizing and destroying waste, whether it comes from household, market, industrial or office waste. The difficulty of handling waste is closely related to the poor condition of human settlements, because the growth of irregular settlements will complicate the process of collecting and transporting waste so that it eventually piles up. The main objective of this research is to know and analyze the waste management in the Waste Management Technical Implementation Unit in Mandau District, Bengkalis Regency based on indicators of collection, transportation and final disposal. The type of research used in this research is qualitative using descriptive surveys and triangulation techniques. The number of informants in this study were 17 people with the Head of the Waste Management Unit of Mandau District as the key informant. Data collection techniques by interview and descriptive data analysis through a qualitative approach.

Keywords: *Management, Garbage, Collection, Transportation and Final Disposal*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia baik kota besar maupun kota kecil, belum memiliki sistem penanganan sampah yang baik (Damanhuri, 2005:1-1). Umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama yaitu metode kumpul – angkut – buang. Sebuah metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan.

Sampah merupakan permasalahan yang terjadi hampir diseluruh pasar. Setiap harinya manusia melakukan kegiatan yang tidak lepas dari sampah, sisa hasil produksi yang sudah tidak diperlukan lagi atau sudah tidak dapat ditarik manfaatnya. Sampah sendiri merupakan suatu benda yang memiliki dampak bagi lingkungan, sehingga lingkungan menjadi tidak seimbang. Sampah juga akan berdampak buruk jika dibiarkan begitu saja. Sampah akan berdampak buruk bagi nilai estetika serta akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun, apabila di bakar akan menimbulkan masalah baru, yaitu polusi udara. Sampah sendiri dibagi menurut asal zat yang di kandunginya, secara garis besar sampah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya sisa sayuran, buah-buahan dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari

benda mati, misalnya plastik, kertas, kaca, kaleng dan besi. Sampah anorganik banyak yang sulit hancur dan sulit diolah. Untuk mengolah sampah ini memerlukan biaya dan teknologi tinggi.

Sampah dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat dan kerugian, bermanfaat jika dimanfaatkan dengan baik dan merugikan jika dibiarkan tanpa ada pengelolaan yang baik. Dampak negatif dari pengelolaan pengolahan sampah yang tidak tepat akan menyebabkan beberapa kerugian. pengelolaan yang buruk mengakibatkan pencemaran baik pencemaran udara, air di dalam dan atas permukaan, tanah, serta munculnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.

Dampak terhadap kesehatan, sampah memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Dari sampah sendiri dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit apabila tidak di kelola dengan baik. Karena dengan adanya tumpukan sampah maka akan berpotensi mengundang hewan serta organisme pembawa wabah penyakit untuk berkembang biak dan berkumpul. Efek yang dapat ditimbulkan antara lain adalah timbulnya wabah penyakit seperti malaria, diare, demam berdarah, serta penyakit lainnya.

Jika sampah dikelola dan diolah dengan baik, akan menghasilkan manfaat positif bagi masyarakat. Lingkungan menjadi bersih, pencemaran dapat diminimalisir, dapat tercipta beberapa barang yang bermanfaat bagi manusia jika di daur ulang, Sampah bisa dimanfaatkan sebagai kompos untuk pupuk organik, selain itu juga bisa diolah menjadi energi bio arang, bio gas dan energi untuk listrik. Lebih jauh sampah dapat dijadikan barang-barang aksesoris, barang fungsional dan sebagai bahan bangunan.

Sampah menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah No 18 tahun 2008 yaitu berupa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terhadap lingkungan memiliki dua komponen yang saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain, contohnya adalah sesuatu keadaan yang sudah tidak seimbang karena satu hal maka akan mempengaruhi organisme dan ekosistem disekitarnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah konsumsi terhadap barang dan jasa, dari peningkatan tersebut akan menghasilkan jumlah sampah yang akan semakin meningkat pula. Peningkatan sampah akan menjadi permasalahan lingkungan, sedangkan dalam hal penanganannya sampai saat ini masih belum ditanggapi dengan tuntas, terutama pada daerah yang padat penduduk seperti perkotaan.

Menurut Kurniawan (Grahamida, 2012 :2), peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah makin bertambah pula. Peningkatan jumlah sampah tersebut seringkali tidak diimbangi oleh sistem pengolahan sampah yang baik. Jumlah sampah yang makin meningkat ini tidak akan bisa dikelola dengan baik apabila penanganannya masih memakai paradigma lama (kumpul-angkut-buang).

Telah diketahui bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau, serta mengakibatkan berkembangnya penyakit. Gangguan lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, dimana penghasil sampah tidak melakukan penanganan dengan baik. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi

sampah dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan dilain pihak kemampuan pengelolaan sampah masih belum memadai.

Pengelolaan sampah yang baik harus memenuhi 3-R *reduce* (mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah), *reuse* (menggunakan kembali barang yang biasa dibuang), dan *recycle* (mendaur ulang). Kunci sukses pengelolaan sampah meliputi:

1. Kredibilitas para pengambil kebijakan.
2. Mekanisme implementasi yang efisien termasuk insentif terhadap pasar.
3. Perhatian yang signifikan terhadap pasar daur ulang.
4. Keterlibatan masyarakat.
5. Komitmen yang berkelanjutan terhadap kualitas yang tinggi terhadap semua operasi fasilitas pengelolaan sampah.
6. Evaluasi yang efektif terhadap strategi atau opsi yang dipilih.

Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan terhadap lingkungan sekitar, selain itu diperlukan juga partisipasi dan dukungan pemerintah untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan menitik beratkan terhadap masalah sampah yang telah menjadi permasalahan utama.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota – kota besar. Kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya,

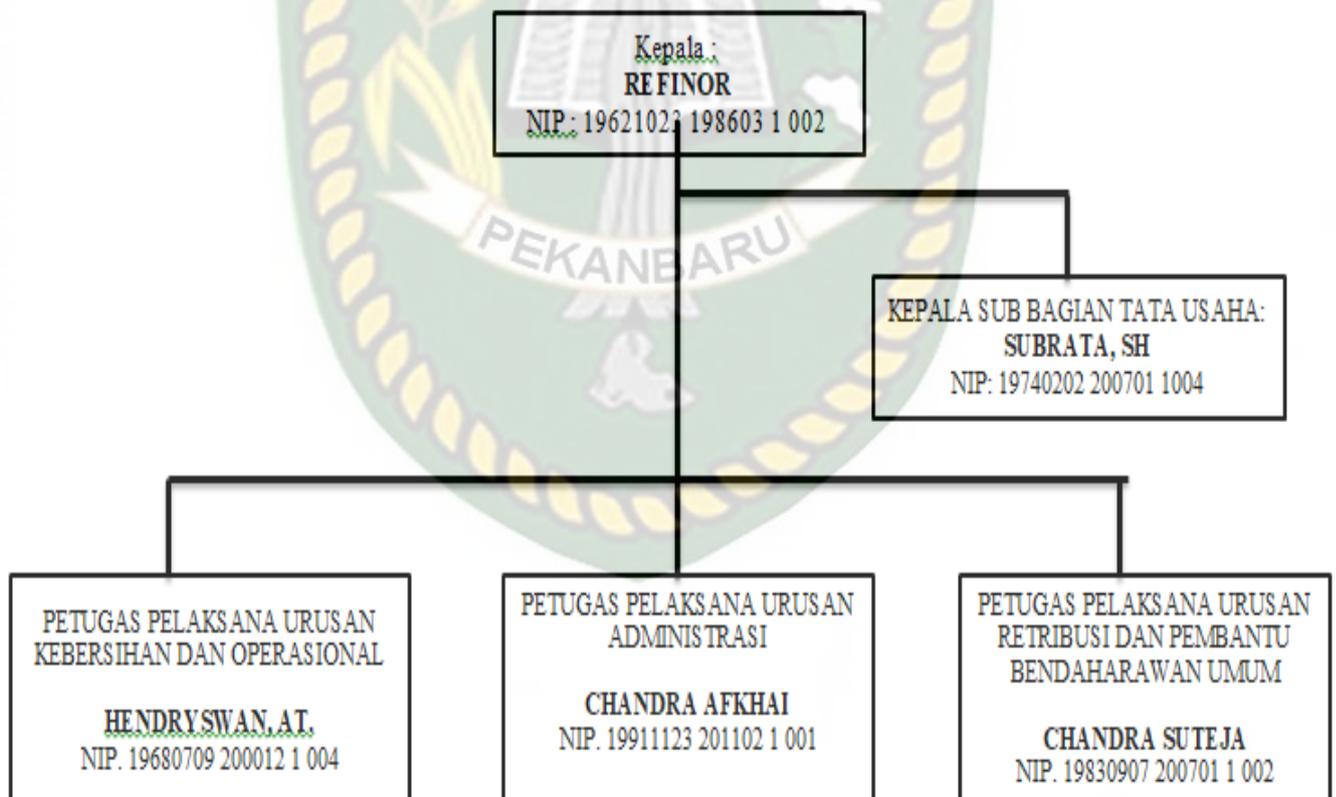
sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit, sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk. Masalah sampah yang timbul di Kota Duri adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun sampah kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman penduduk, karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur akan mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah. Dalam Pasal 3 menyebutkan Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah dan pada Pasal 5 dijelaskan bahwa Tugas Pemerintah Daerah yaitu bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan

sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah.

UPT Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana operasional secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Adapun struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Gambar.L1 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis



Sumber : UPT Pengelola Sampah Kecamatan Mandau, 2020

Program kebersihan kota dan penanggulangan sampah pada umumnya sudah dilaksanakan oleh hampir semua pemerintah daerah kota/kabupaten di seluruh nusantara, termasuk Kota Duri. Kota Duri sebagai sentral pembangunan, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan budaya, merupakan tempat berdomisilinya puluhan ribu penduduk. Fenomena ini memberikan implikasi kepada segala bidang kehidupan perkotaan dan salah satu diantaranya adalah implikasi terhadap peningkatan terhadap produksi sampah.

Tingkat kompleksitas masalah penanganan sampah ini, tidak terlepas dari implikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pesatnya pertumbuhan kota,
2. Pesatnya / cepatnya pertumbuhan penduduk di kota, akibatnya makin banyak pula sampah yang dihasilkan,
3. Tuntutan penyediaan fasilitas publik perkotaan,
4. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik termasuk dalam pengelolaan sampah,
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, rendahnya partisipasi dalam membayar retribusi layanan kebersihan.

Masalah sampah Kota Duri selama ini dikelola oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kebersihan kota, pasar, jalan, dan lingkungan. Namun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya, dana, SDM, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sehingga beberapa wilayah atau kawasan kota Duri masih tampak sampah berceceran tidak

terangkut yang apabila dibiarkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari segi ekologi, estetika, dan pada akhirnya berpengaruh pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kepala UPT pengelolaan sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup, Refinor saat ditemui GoRiau.com tidak mengelak, bahwa penggunaan TPA tersebut hanya bisa digunakan selama 2,5 Tahun lagi. Setiap harinya, sampah dari dua kecamatan tersebut sekitar 144 kubik. TPA yang memiliki luas 5 hektar memiliki waktu pemakaian kurang lebih 2,5 tahun lagi karena sudah tidak ada sisa lahan yang bisa digunakan untuk menampung sampah dari dua kecamatan tersebut, papar Refinor, selasa (7/11/2018).

Masalah sampah yang timbul di daerah perkotaan adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah baik yang berasal dari rumah tangga, industri maupun umum. Mekanisme pengelolaan sampah di Kecamatan berupa sampah- sampah yang telah di kumpulkan di beberapa TPS kemudian sampah tersebut diangkut menggunakan mobil dumbtruk kemudian sampah tersebut di bawa ke TPA, setelah sampai di TPA sampah-sampah tersebut dibiarkan dan diratakan sama alat berat, hanya sebagian yang dipergunakan untuk pembuatan kompos.

Adapun jumlah TPS yang disediakan di Kecamatan Mandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1 Data Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Mandau Tahun 2018

No	TPS	Alamat	Jumlah
1	Kawasan Sebangga	Jl. Wonosobo	1
2	Kawasan Pujasera	Jl. Zainal Abidin	1
3	Kawasan Pipa Air Bersih	Jl. Pipa Air Bersih 125	1
4	Pasar Dewi Sartika	Jl. Dewi Sartika Mandau	1
5	Pasar Mandau Raya	Jl. Jendral Sudirman	1
Jumlah			5

Sumber : UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah bak penampungan sampah yang disediakan masih sangat kurang, dimana Kota Duri memiliki Jumlah penduduk yang mencapai 248.185 jiwa dan terdiri dari 11 kelurahan atau desa, tentunya dengan jumlah yang sebanyak itu tidak seimbang dengan tempat sampah yang disediakan.

Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah setempat membuat masyarakat membuang sampah sembarangan kelahan kosong milik orang lain, hal ini yang menyebabkan banyak terdapat tempat pembuangan sampah illegal yang dibuat sendiri oleh masyarakat untuk membuang sampah rumah tangganya. Selain itu masyarakat juga menggunakan badan jalan yang ada di Kota Duri untuk membuang sampah seperti di Jalang Hangtuah. Jika tidak cepat ditindak lanjuti oleh pihak – pihak terkait maka tempat pembuangan sampah illegal itu akan semakin bertambah secara terus menerus.

Pembuangan sampah sembarangan mengakibatkan tumpukan sampah di Kota Duri tidak hanya berada dibadan jalan, dan lahan kosong bahkan tumpukan sampah berada dekat dengan lingkungan pemukiman sehingga membuat kenyamanan dan ketenangan masyarakat yang berada dekat dengan lokasi tumpukan sampah terganggu dengan bau busuk yang ditimbulkan dari

tumpukan sampah. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi sampah telah menyediakan armada pengangkut sampah. Berikut jumlah armada pengangkut sampah yang berada di Kota Duri:

Tabel I.2 Data Armada Pengangkut Sampah yang berada di Kota Duri Kecamatan Mandau

No	Nama dan Jenis Kendaraan	Kapasitas (m ³)	Kondisi	Jumlah kendaraan
1	Navara (pick up)	-	Baik	1
2	Hilux (pick up)	-	Baik	3
3	Phanter (pick up)	-	Baik	1
4	Toyota Dyna (Dump Truck)	7 m ³	Baik	4
5	Hyundai (Dump Truck)	7 m ³	Baik	1
6	Hino (Dump Truck)	7 m ³	Baik	1
7	Toyota Dyna (Amroll)	5 m ³	Baik	4
8	Hilux	3 m ³	Baik	2
9	Triseda (Becak Motor)	1 m ³	Baik	3
10	Bulldozer	-	Baik	1
	Total			21

Sumber : UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, 2018

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat jumlah Armada yang disediakan sebanyak 21 Armada pengangkut sampah yang beroperasi dan dibagi dalam beberapa jadwal pengangkutan, namun dengan jumlah armada yang disediakan masih belum mampu mengangkat tumpukan sampah yang berada di sekitar lingkungan pemukiman di Kota Duri terutama pada tempat tumpukan sampah ilegal yang dibuat oleh masyarakat.

Sampah rumah tangga masyarakat ditampung di tempat pemrosesan akhir yang berada di Jalan Lintas Duri-Dumai Kilometer 9 Gang Suliki, Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sejak tahun 2002 silam setiap tahunnya, volume sampah dari Kecamatan Mandau meningkat 20 persen. Penanganan sampah khususnya untuk mengangkut hingga ke tempat

pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan ditangani langsung oleh petugas resmi dari UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan. Adapun jam kerja dan rute pemungutan sampah di Kota Duri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.3 Jam Kerja dan Rute Pengangkutan Sampah di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

NO	NAMA PETUGAS	JAM KERJA	RUTE	KETERANGAN
1	Rusdi	14.00 Wib	Dari U- Turn masjid Jami' menuju pokok jengkol berputar arah kembali ke U-Turn Jami'	Sampah yang diambil, Trotoar Kiri – Kanan dan Median
2	Andi Putra	16.00 Wib	Dari simpang Garoga sampai ke pokok jengkol berputar arah menuju ke simpang Garoga - TPA	Sampah yang diambil Trotoar dan median kiri kanan
3	Sayfrizal	08.00 Wib	Dari simpang Garoga sampai ke pokok jengkol berputar arah menuju ke simpang Garoga - TPA	Sampah yang diambil Trotoar dan median kiri kanan
4	Herman	12.00 Wib	Dari Pokok Jengkol – Manci – Simpang Garoga - TPA	Sampah yang diambil trotoar dan median kiri
5	Zainal	06.00 Wib	Dari U-Turn masjid Jami' menuju pokok jengkol berputar arah menuju TPA	Sampah yang diambil trotoar kiri kanan dan median
6	Hatta	08.00 Wib	Dari pokok jengkol sampai simpang garoga berputar arah menuju pokok jengkol – TPA	Sampah yang diambil trotoar dan median kiri kanan.

Sumber : UPT Pengelolaan Sampah Kec. Mandau, 2020

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup hanya mengangkut sampah ditempat – tempat tertentu yaitu di jalan protokol kota Duri. Peran UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan

Hidup seharusnya dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat seperti RW dan RT dalam menangani masalah sampah yang mengotori sekitaran pemukiman warga, serta membuat perencanaan yang lebih baik lagi agar pihak-pihak yang tergabung dapat menjalankan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan upaya dengan cara mengajak masyarakat bergotong royong bersama untuk ikut serta membersihkan tumpukan sampah yang berada disekitar daerah pemukiman yang tidak dilewati oleh petugas kebersihan. Selain itu, UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup juga telah berusaha memberikan peringatan larangan pembuangan sampah sembarangan, namun peringatan tersebut tetap saja tidak dihiraukan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan – permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bak penampungan sampah yang disediakan oleh pemerintah Kecamatan Mandau belum bisa menampung jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, dimana Kota Duri memiliki jumlah penduduk yang mencapai 248.185 jiwa dan terdiri dari 11 kelurahan namun hanya memiliki 5 bak penampungan sampah.
2. Jumlah armada yang disediakan oleh pemerintah sebanyak 21 armada pengangkut sampah yang beroperasi dan di bagi dalam beberapa jadwal pengangkutan, namun dengan jumlah armada ini masih belum mampu mengangkut tumpukan sampah yang berada disekitar

lingkungan permukiman di Kota Duri terutama pada tempat tumpukan sampah ilegal yang dibuat oleh masyarakat.

3. Masih rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, hal ini terlihat dari sebagian besar masyarakat Duri yang membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga menyebabkan sampah berserakan dimana – mana terutama di sekitar permukiman masyarakat.

Melihat penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

1.3. Tujuan Penulisan

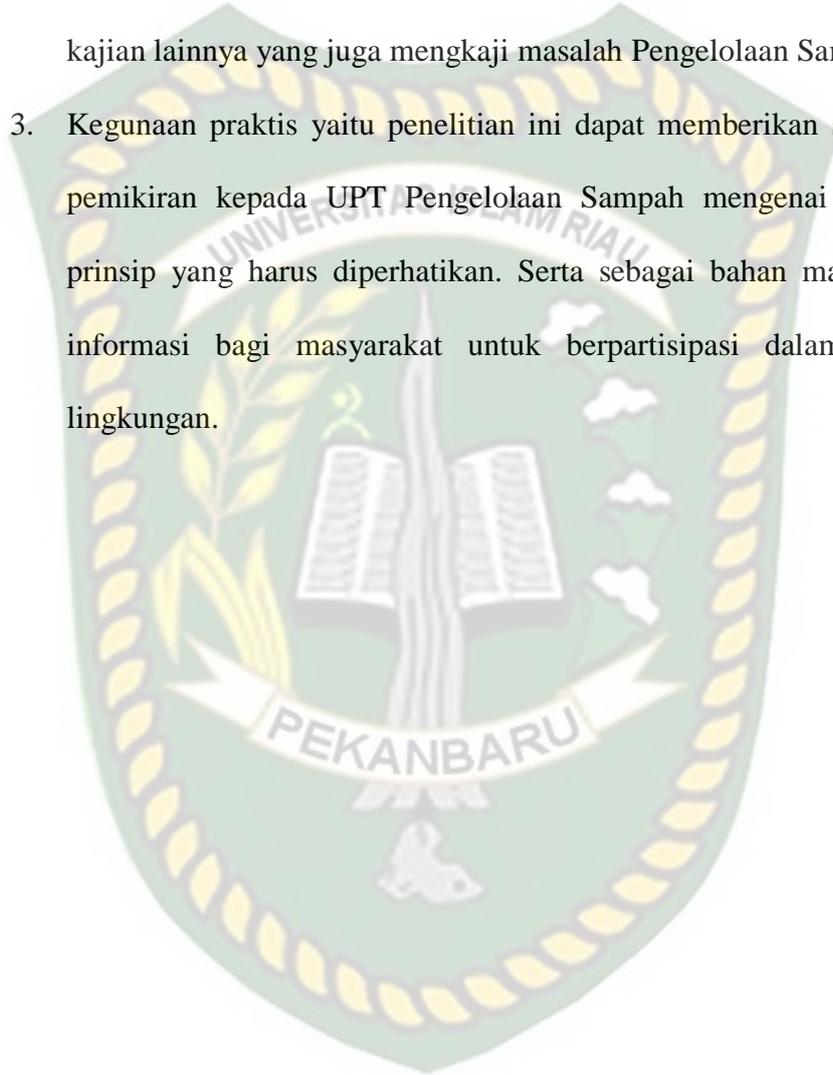
Adapun tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola Sampah Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, khususnya administrasi publik dan manajemen.

2. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini yaitu sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dapat bermanfaat bagi lembaga – lembaga kajian lainnya yang juga mengkaji masalah Pengelolaan Sampah
3. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada UPT Pengelolaan Sampah mengenai hal – hal prinsip yang harus diperhatikan. Serta sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Administrasi

Menurut Handayani (2002:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen sebagai berikut : Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, suratmenyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menysurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi dalam arti luas berasal dari kata Administration (bahasa Inggris) yang dikemukakan beberapa ahli dan dikutip oleh Handayani (2002:2). Administrasi dalam arti luas yaitu : Leonard D. White dalam bukunya *Introduction to The Study of Public Administration* mengatakan :

Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale... etc. (Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, swasta, sipil, atau militer, usaha besar atau kecil, dan sebagainya). Di dalam proses administrasi pada umumnya memerlukan dua orang atau lebih dan kelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berada dalam suatu negara, yang bekerja di

bidang swasta, bidang sipil atau bidang militer yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Gie (2009:9) dalam bukunya administrasi perkantoran modern mengatakan bahwa : “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.” Administrasi secara luas tersebut menjelaskan bahwa serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Menurut Siagian (2008:2) dalam buku Filsafat Administrasi mengatakan: “Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang administrasi oleh pendapat para ahli di atas bahwa pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut

Prajudi Atmosudirdjo adalah “tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya”. (dalam Ayub, 2007:30).

Selain menurut Prajudi Atmosudirdjo ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit. Menurut Ismail Nawawi administrasi dalam arti sempit adalah “mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional”. (Nawawi, 2009:33)

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pengolahan data dan informasi yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan secara tertulis yang diperlukan oleh suatu organisasi.

Ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai administrasi dalam arti luas. Menurut Siagian administrasi dalam pengertian luas adalah “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. (dalam Ayub, 2007:30). Apabila melihat pendapat dari Siagian, administrasi dapat diilustrasikan seperti pemain sepak bola yang melakukan sebuah kerjasama bersama pemain lainnya untuk memenangkan timnya dalam sebuah pertandingan.

Pengertian administrasi dalam arti luas menurut ahli lainnya, yaitu Nawawi, mengatakan bahwa:

Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam

kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien. (Nawawi, 2009:35).

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

2. Konsep Organisasi

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan daripada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi yang “statis”, karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat “Dinamis”. Pengertian ini organisasi dilihat daripada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tataberhubungan yang terjadi di dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Waldo yang dikutip oleh Silalahi (2003:124) menyatakan definisi organisasi adalah : “Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi”.

Sedangkan pengertian organisasi menurut Thoha yang dikutip oleh (Silalahi 2003:124) mengemukakan bahwa:

“Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk

menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarkidan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi.

Adapun pengertian Organisasi menurut Weber yang dikutip oleh Thoha (2014:113) bahwa :“Organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.”.

Menurut Akdon (2006: 43) secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dan melaksanakan kegiatan dengan sesuai dengan peranan tersebut bersama-sama secara terpadu mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Kajian organisasi tidak hanya padakumpulan orang-orang, aktivitas-aktivitas mereka dan tujuan yang akan dicapai, tapi juga semua aspek yang mempengaruhi eksistensi, perkembangan dan efektivitas organisasi tersebut, antara lain: rincian dan susunan tugas, barang dan mesin, teknologi, informasi dan sumber-sumber lain yang digunakan serta saling berpengaruh dan keterpaduannya dalam suatu sistem.

Robbin dalam Akdon (2006: 45) mengemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang tidak dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Perkataan dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang

berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, organisasi sosial merupakan kesatuan sosial, maka pola interaksi anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk meminimalkan kelebihan namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan.

Dalam pengertian sederhana organisasi sering diartikan sebagai kelompok orang yang bekerjasama dan ingin mencapai tujuan bersama. Organisasi didirikan karena beberapa tujuan tertentu yang hanya dapat dicapai melalui tindakan yang harus dilakukan bersama-sama, apakah tujuan itu berupa laba, pemberian pendidikan, sosial dan lain-lain.

Dalam literatur dewasa ini, arti organisasi beraneka ragam. Walaupun banyak perbedaan dalam memberikan pengertian atau definisi organisasi oleh beberapa ahli manajemen, tetapi perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai elemen dasar yang sama yaitu adanya sekelompok orang, kerjasama, proses pembagian kerja, pengaturan hubungan dan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Barnard dalam buku Wursanto (2005:53) mendefinisikan organisasi adalah suatu sistem usaha bersama antara dua orang atau lebih, sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, yang sebagian besar mengenai hubungan-hubungan kemanusiaan.

Atmosudirdjo dalam buku Wursanto (2005:53) mendefinisikan organisasi itu sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan yang tertentu.

Istilah organisasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kesatuan orang-orang yang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu. Istilah sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam masyarakat. Organisasi sosial yang merupakan gabungan dari kedua istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu susunan atau struktur dari berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat, dimana hubungan tersebut merupakan suatu kesatuan yang teratur. Secara luas organisasi sosial diartikan sebagai jaringan tingkah laku manusia dalam ruang lingkup yang kompleks pada setiap masyarakat. Secara ringkas organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pelapisan terstruktur hubungan antar manusia yang saling ketergantungan (Syani. 2007 : 115).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Organisasi adalah suatu himpunan interaksi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama.
2. Organisasi merupakan suatu wadah dan alat pelaksanaan proses manajemen untuk mencapai tujuan bersama.
3. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka dan organisasi sebagai kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
4. Organisasi adalah tempat kerjasama formal dari sekelompok orang, dalam melakukan tugas-tugasnya.
5. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan, pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Adapun unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M yaitu *man, money, mothode, machines, materials, dan market*. Manajemen adalah suatu cara/seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Sumber daya manusia merupakan kekayaan (*asset*) organisasi yang harus didayagunakan secara optimal sehingga diperlukannya suatu manajemen untuk mengatur sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3).

Adapun definisi manajemen yang dikutip oleh Hasibuan (2012;1) menyatakan “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian

(*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Handoko, 1999: 8).

Kemudian definisi Manajemen menurut Massie yang dikutip oleh Arsyad (2002;1) menyatakan “Manajemen adalah suatu proses dimana kelompok secara kerjasama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang lain menuju tercapainya tujuan bersama”.

Sedangkan menurut Terry (2010;16) menjelaskan bahwa “Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Terry (2005: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pebarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

4. Konsep Kebijakan

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang

lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Wahab maupun Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan - ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno 2009 : 11).

Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk

melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesesuaian antararancangan dengan implementasi.

Menurut Hanifah (Harsono, 2002: 67) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Setiawan (2004: 39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman - pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk

kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan dipedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

6. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning*, *organising*, *actuating*, dan *controlling*.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa :Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata *kelolah*. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menanganis sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa :Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Dari pengertian diatas Admosudirjo menitik beratkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan

sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Qalyubi, 2007: 271).

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli di atas, maka yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan

pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan asli desa. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian.

7. **Konsep Sampah**

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Menurut Manik (2003 : 67) sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia, sedangkan menurut Badan Standardisasi Nasional dalam Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan mendefinisikan sampah sebagai limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. (Nugroho, 2013:31). Penumpukan sampah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah volume sampah yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Pengelolaan sampah yang terjadi selama ini dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada lingkungan, dan kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah.

Menurut Suhatro (2011:43) mengatakan pemerintah belum begitu serius dalam memikirkan masalah sampah ini. Meski pemerintah sudah melakukan beberapa terobosan namun di beberapa tempat pembuangan sementara (TPS) gunung sampah masih sangat mengganggu masyarakat dan masih menjadi perhatian. Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial (sulit terselesaikan). Oleh sebab itu bila tidak ditangani secara benar, maka akan menimbulkan dampak seperti pencemaran air, udara, dan tanah yang mengakibatkan sumber penyakit.

Pengolahan sampah membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah sebagai barang yang masih bisa dimanfaatkan tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijikan, melainkan harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang berguna lainnya. Seharusnya pengolahan sampah harus dilakukan dengan efisien dan efektif, yaitu sebisa mungkin dekat dengan sumbernya, seperti dilingkungan RT/RW, sekolah, dan rumah tangga sehingga jumlah sampah dapat dikurangi.

Pengelolaan sampah diantaranya dapat dimanfaatkan menjadi kompos organik yang didalamnya terkandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman

(Nugroho, 2013:31), perbaikan struktur tanah dan zat yang dapat mengurangi bakteri yang merugikan dalam tanah. Pupuk organik biasanya tidak meninggalkan residu / sisa dalam tanaman sehingga hasil tanaman akan aman bila dikonsumsi (Sastrawan, 2014:65).

Menurut Nugroho (2013 :32), jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Berdasarkan sumbernya

- a. Sampah alam Yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjaditanah . Di luar kehidupan liar, sampah- sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman
- b. Sampah manusia Sampah manusia (*human waste*) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dansanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (*plumbing*).
- c. Sampah konsumsi Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia(pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

d. Sampah Industri Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah. Berikut adalah gambaran dari limbah yang berasal dari beberapa industri, yaitu :

- 1) Limbah industri pangan (makanan), sebagai contoh yaitu hasil ampas makanan sisa produksi yang dibuang dapat menimbulkan bau dan polusi jika pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat.
- 2) Limbah Industri kimia dan bahan bangunan, sebagai contoh industri pembuat minyak pelumas (OLI) dalam proses pembuatannya membutuhkan air skala besar, mengakibatkan pula besarnya limbah cair yang dikeluarkan ke lingkungan sekitarnya. air hasil produksi ini mengandung zat kimia yang tidak baik bagi tubuh yang dapat berbahaya bagi kesehatan.
- 3) Limbah industri logam dan elektronika, bahan buangan seperti serbuk besi, debu dan asap dapat mencemari udara sekitar jika tidak ditangani dengan cara yang tepat.

2. Berdasarkan sifatnya

- a. Sampah organik Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
- b. Sampah anorganik Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk

dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas.

3. Berdasarkan bentuknya

- a. Sampah padat Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain.

Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi:

1. *Biodegradable* yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob (menggunakan udara/terbuka) atau anaerob (tidak menggunakan udara/tertutup), seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.
2. *Non-biodegradable* yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologis, yang dapat dibagi lagi menjadi:
 - a. *Recyclable* yaitu sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.
 - b. *Non-recyclable* yaitu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti *tetra packs* (kemasan pengganti kaleng), *carbon paper*, *thermo coal* dan lain-lain.

3. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

a. Limbah hitam yaitu sampah cair yang dihasilkan dari toilet.

Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya.

b. Limbah rumah tangga seperti sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung patogen.

8. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau

diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Alfiandra (2009:55) menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut.

1. Pengumpulan,

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara, atau langsung ke tempat pembuangan atau pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan (Damanhuri: 2010 :72).

Menurut Damanhuri (2010:72) operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau ke lokasi pembuangan akhir, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (*door to door*), atau secara tidak langsung (dengan menggunakan Transfer Depo/Container) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS), dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Secara Langsung (*door to door*): Pada sistem ini proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan. Sampah dari tiap-tiap sumber akan diambil, dikumpulkan dan langsung diangkut ke tempat pemrosesan, atau ke tempat pembuangan akhir.
- b. Secara Tidak Langsung (*Communal*): Pada sistem ini, sebelum diangkut ke tempat pemrosesan, atau ke tempat pembuangan akhir, sampah dari masing-masing sumber akan dikumpulkan dahulu oleh sarana pengumpul seperti dalam gerobak tangan (*hand cart*) dan diangkut ke TPS. Tempat penampungan sementara merupakan suatu bangunan atau tempat yang digunakan untuk memindahkan sampah dari gerobak tangan (*hand cart*) ke landasan, kontainer atau langsung ke truk pengangkut sampah (Damanhuri: 2010:73).
- c. Bak komunal yang dibangun permanen dan terletak di pinggir jalan Hal yang harus diperhatikan adalah waktu pengumpulan dan frekuensi pengumpulan. Sebaiknya waktu pengumpulan sampah adalah saat dimana aktivitas masyarakat tidak begitu padat, misalnya pagi hingga siang hari. Frekuensi pengumpulan sampah menentukan banyaknya sampah yang dapat dikumpulkan dan diangkut perhari. Semakin besar frekuensi pengumpulan sampah, semakin banyak volume sampah yang dikumpulkan per service per kapita.

2. Pengangkutan,

Pengangkutan yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu

mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);

Menurut Damanhuri (2010:73), pengangkutan sampah adalah sub-sistem yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir, atau TPA. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut, khususnya bila:

- a. Terdapat sarana pemindahan sampah dalam skala cukup besar yang harus menangani sampah
- b. Lokasi titik tujuan sampah relatif jauh
- c. Sarana pemindahan merupakan titik pertemuan masuknya sampah dari berbagai area.
- d. Ritasi perlu diperhitungkan secara teliti
- e. Masalah lalu lintas jalur menuju titik sasaran tujuan sampah

Adapun syarat alat pengangkut sampah adalah antara lain adalah :

- a. Alat pengangkut sampah harus dilengkapi dengan penutup sampah, minimal dengan jarring
- b. Tinggi bak maksimum 1,6 m
- c. Sebaiknya ada alat ungkit
- d. Kapasitas disesuaikan dengan kondisi/ kelas jalan yang akan dilalui
- e. Bak truk/ dasar kontainer sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah.

3. Pembuangan akhir,

Pembuangan akhir dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Pengelolaan sampah menurut Kartikawan (2007:77) adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir sebagai berikut :

1. Penimbunan sampah (*solid waste generated*)

Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan (*solid waste is generated, not produced*). Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis dan kegiatannya. Idealnya, untuk mengetahui besarnya timbulan sampah yang terjadi, harus dilakukan dengan suatu studi.

Tetapi untuk keperluan praktis, telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah SK SNI S-04-1993-03 tentang Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang. Dimana besarnya timbulan sampah untuk kota sedang adalah sebesar 2,75-3,25 liter/orang/hari atau 0,7- 0,8 kg/orang/hari.

2. Penanganan di tempat (*on site handling*)

Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di tempat pembuangan. Kegiatan ini bertolak dari kondisi di mana suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah

ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi pemilahan (*shorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*).

3. Pengumpulan (*collecting*)

Pengumpulan adalah kegiatan pengumpulan sampah dan sumbernya menuju ke lokasi TPS. Umumnya dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong dan rumah-rumah menuju ke lokasi TPS.

4. Pengangkutan (*transfer and transport*)

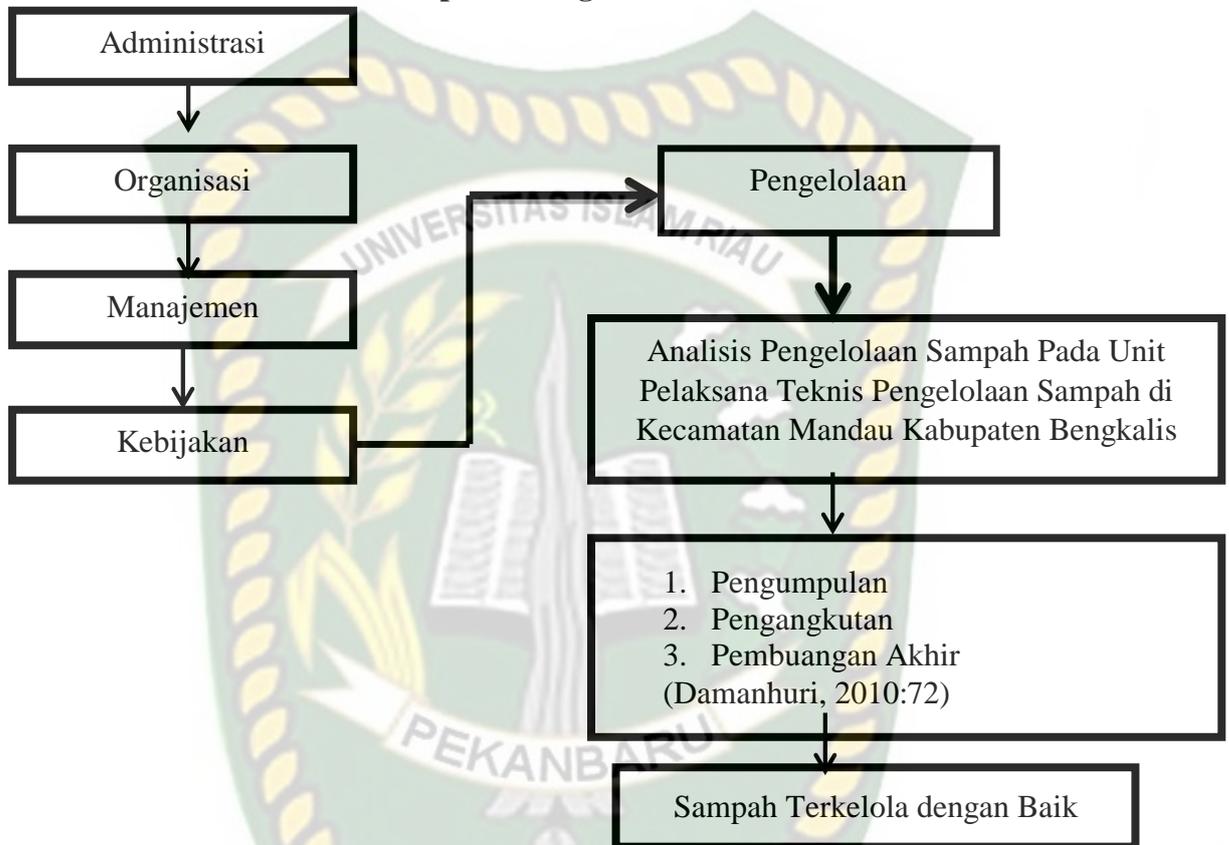
Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan sampah dan TPS menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau lokasi pembuangan akhir.

5. Pengolahan (*treatment*)

6. Pembuangan akhir

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/ gejala yang diteliti berhasil dihimpun oleh penulis sebagian besar dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori – teori yang telah ada mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Sampah sekaligus menjadi acuan dalam menganalisis pada penelitian ini.

Tabel II.1 :Penelitian Terdahulu tentang Analisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo dan Noeng Muhadjir (2017) Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah	Kebijakan	1. Akuntabilitas 2. Monitoring 3. Evaluasi	Persamaan dalam pengelolaan sampah di lima kabupaten/kota di DIY adalah kebijakan yang diterapkan di setiap wilayah bervariasi dasar hukumnya. Akan tetapi, telah ada badan/unit yang bertanggung jawab mengelola sampah dengan berbagai program dan proyek yang dijalankan sebagai bentuk pelayanan publik di DIY sesuai dengan ketentuan undang-undang persampahan.	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada variable dan indikator yang digunakan
2.	Ch Monica Sitanggang (2017) Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (studi kasus RW 6, 7	Perencanaan	1. Pewadahan 2. Pengumpulan 3. Pemindahan dan TPS 4. Pengangkutan	Pengelolaan sampah di RW 6, 7 dan 8 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Utara belum dilakukan	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada variable dan indikator yang

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
	8 dan Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang)			secara optimal. Volume timbunan sampah per orang per hari mencapai 2,46 liter/orang/hari dan berat sampah mencapai 0,20 kg/orang/hari. Pola pengelolaan sampah menggunakan paradig.	digunakan
3.	Mirawati (2017) Analisis Kinerja Pengolahan Sampah di Kota Metro (Study di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Kota Metro)	Kinerja	1. Partisipasi 2. Efektifitas 3. Efisiensi	Hasil penelitian menunjukkan Kinerja dari pengolahan sampah UPT Kebersihan Kota Metro cukup baik, Terbukti dengan kondisi kebersihan jalan utama, dan berprestasi, mampu mendapat piala Adipura, sebagai Kota Bersih, meningkatnya hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan Kota Metro, walaupun belum secara	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada variable dan indikator yang digunakan

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
				menyeluruh wilayah Kota Metro dapat terjangkau karena kurangnya jumlah Pekerja/ petugas pengakut sampah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, untuk Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .	
4.	Agra Bahana (2017) Analisis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.	Pengelolaan	1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Personalia 4. Pengarahan 5. Pengawasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah yang dilakukan di kecamatan Pedurungan kota Semarang, terdapat berbagai permasalahan seperti sarana dan prasarana masih belum baik; kurangnya kepedulian masyarakat mengenai sampah; rekomendasi dari penelitian yaitu penambahan kru truk dan	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada indikator yang digunakan dalam penelitian.

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
				bimbingan pengelolaan sampah.	
5.	Loisa Novany (2014) Analisis Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado. (Jurnal Sabua Vol. 6, No. 3:321-331 November 2014).	Pengelolaan Persampahan	1. Aspek teknik operasional 2. Aspek organisasi 3. Aspek pembiayaan 4. Aspek hukum dan peraturan 5. Aspek peran serta masyarakat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan permukiman tergantung pada keberadaan kondisi infrastruktur dan status sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan persampahan yang berbeda sesuai karakteristik lingkungan permukiman.	Persamaan terletak pada objek dan variable penelitian yaitu pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada indikator yang digunakan dalam penelitian dan teknik analisis data serta metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.
6.	Jailan Sahil (2016) Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa – Dufa Kota Ternate. (Jurnal BIOeduKasi Vol. 4 No. 2 Maret 2016. ISSN:2301-4678).	Pengelolaan Persampahan	1. Pengumpulan sampah 2. Pengangkutan sampah 3. Pemusnahan sampah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan persampahan di Kota ternate belum cukup baik, beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa masih mengalami permasalahan	Persamaan terletak pada objek dan variable penelitian yaitu pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada indikator yang digunakan dalam penelitian dan teknik analisis data serta metode yang digunakan dalam

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
				yakni budaya sikap dan perilaku masyarakat, timbunan dan karakteristik sampah, serta sarana pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir sampah.	menganalisis data penelitian.
7.	Muchammad Zamzami Elamin (2018) Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang	Pengelolaan Sampah	1. Pengumpulan 2. Pemindahan 3. Pemilahan dan pengolahan 4. Pengangkutan 5. Pembuangan akhir	Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Desa tersebut masih kurang baik hal ini dikarenakan tidak adanya lahan untuk pembangunan tempat penampungan sementara, fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum baik, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pengelolaan sampah dengan baik dan benar.	Persamaan terletak pada objek dan variable penelitian yaitu pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada indikator yang digunakan dalam penelitian dan teknik analisis data serta metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.
8.	Mohamad Rizal (2015)	Pengelolaan Persampahan	1. Pengelolaan persampahan 2. Ketersediaan	Hasil penelitian mendapatkan bahwa	Persamaan terletak pada objek dan

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
	Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)		SDM 3. Sarana dan prasarana 4. Partisipasi 5. Faktor – faktor yang mempengaruhi	pengelolaan persampahan di Kota Donggala sudah cukup baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Donggala adalah partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan staf dan jumlah tenaga kebersihan.	variable penelitian yaitu pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada indikator yang digunakan dalam penelitian dan teknik analisis data serta metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.
9.	Cahyo (2017) Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Semarang Jurnal Administrasi Publik FISIP Undip.	Strategi Pengelolaan Sampah	1. <i>Strength</i> 2. <i>Weakness</i> 3. <i>Opportunity</i> 4. <i>Threat</i>	Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan menunjukan bahwa faktor pendukung penerapan pengelolaan sampah terpadu meliputi adanya dukungan politik, baik dari DPRD Kota maupun Walikota dan keterlibatan Stakeholder.	Persamaan terletak pada objek dan variable penelitian yaitu pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada indikator yang digunakan dalam penelitian dan teknik analisis data serta metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.
10.	Putri Nilam Sari (2015) Analisis Pengelolaan Sampah Padat	Pengelolaan sampah	1. Perencanaan 2. Pewadahan 3. Pengangkutan 4. Pembuangan	Hasil penelitian menunjukkan belum adanya perencanaan khusus dalam	Persamaan terletak pada objek dan variable penelitian yaitu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
	di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. (Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas Vol. 10 No. 2 Hal 157-165).		5. Pemantauan dan evaluasi	pengelolaan sampah karena tidak adanya tempat pengelolaan sampah.	pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada indikator yang digunakan dalam penelitian dan teknik analisis data serta metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.

2.4. Konsep Operasional

Untuk keseragaman pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pemahaman dan pengertian, maka akan dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut :

1. Administrasi adalah proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan
2. Organisasi adalah suatu sistem usaha bersama antara dua orang atau lebih, sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, yang sebagian besar mengenai hubungan-hubungan kemanusiaan.
3. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses

penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
5. Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.
6. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
7. Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.
8. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi

kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

10. Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara.
11. Pengangkutan yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan.
12. Pembuangan akhir dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Secara terperinci operasionalisasi variabel masing – masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2 : Operasionalisasi Variabel Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Terry (2005: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pebgarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.	Pengelolaan Sampah pada Kecamatan Mandau	1. Pengumpulan	a. Secara langsung b. Secara tidak langsung c. Bak komunal
		2. Pengangkutan	a. Kendaraan pengangkut sampah b. Rute pengangkutan sampah c. Operasional pengangkutan sampah
		3. Pembuangan akhir	a. Penimbunan sampah b. Penanganan ditempat c. Pengumpulan d. Pengangkutan e. Pengolahan f. Pembuangan akhir

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Menurut Moleong (2000: 5) penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan yang mengiring peneliti untuk meneliti adalah masih rendahnya kinerja UPT pengelolaan sampah dalam menangani permasalahan sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif

tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pengelolaan Sampah Pada UPT Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah 1 orang Kepala UPT Pengelolaan Sampah.

Adapun informan pendukung dari penelitian ini terdiri dari 1 orang Petugas Urusan Kebersihan dan Operasional, dan 6 orang Petugas Pengangkut Sampah di Kecamatan Mandau serta 9 orang masyarakat di Kecamatan Mandau. Dari keseluruhan jumlah *Key Informan* dan informan pendukung berjumlah 17 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III.1 : Jumlah Informan Pada Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala UPT Pengelolaan Sampah	1
2	Petugas Pelaksana Urusan Kebersihan dan Operasional	1
3	Petugas Pengangkut Sampah	6
4	Masyarakat di Kecamatan Mandau (9 kelurahan)	9
	Jumlah	17

Sumber: UPT Pengelolaan Sampah Kec. Mandau, 2020

3.4. Teknik Penarikan Informan

Ada dua teknik yang digunakan dalam penarikan informan pada penelitian ini yaitu teknik sensus (teknik sampling jenuh) yang ditujukan untuk informan kepala UPT Pengelolaan sampah, petugas pelaksana urusan kebersihan dan operasional dan petugas pengangkut sampah, dikarenakan jumlah yang relative

sedikit dan mempunyai tugas serta fungsi yang berbeda yang berkaitan erat dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau. Menurut Sugiono (2014:118) teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Sedangkan kepala keluarga penulis menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2014:119) teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penulis menetapkan kepala keluarga sebanyak 9 orang diambil dari 1 orang kepala keluarga dalam 1 kelurahan serta mengetahui mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer. Sumber / data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dilapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.
2. Data sekunder. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012: 225). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur – literatur, jurnal, koran dan berbagai informasi lainnya yang

berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moeleong (2012: 121) sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata – kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film dalam penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan adalah kata – kata dan tindakan orang – orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat yang terkait dengan Analisis Pengelolaan Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

1. Wawancara (Interview)

Untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendalam, dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yang diterapkan pada pihak – pihak tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2012: 316). Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala UPT, Petugas pelaksana dan petugas pengangkut sampah.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2012: 145) yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses

kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari pendapat tersebut peneliti memahami bahwa, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala – gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2012: 146).

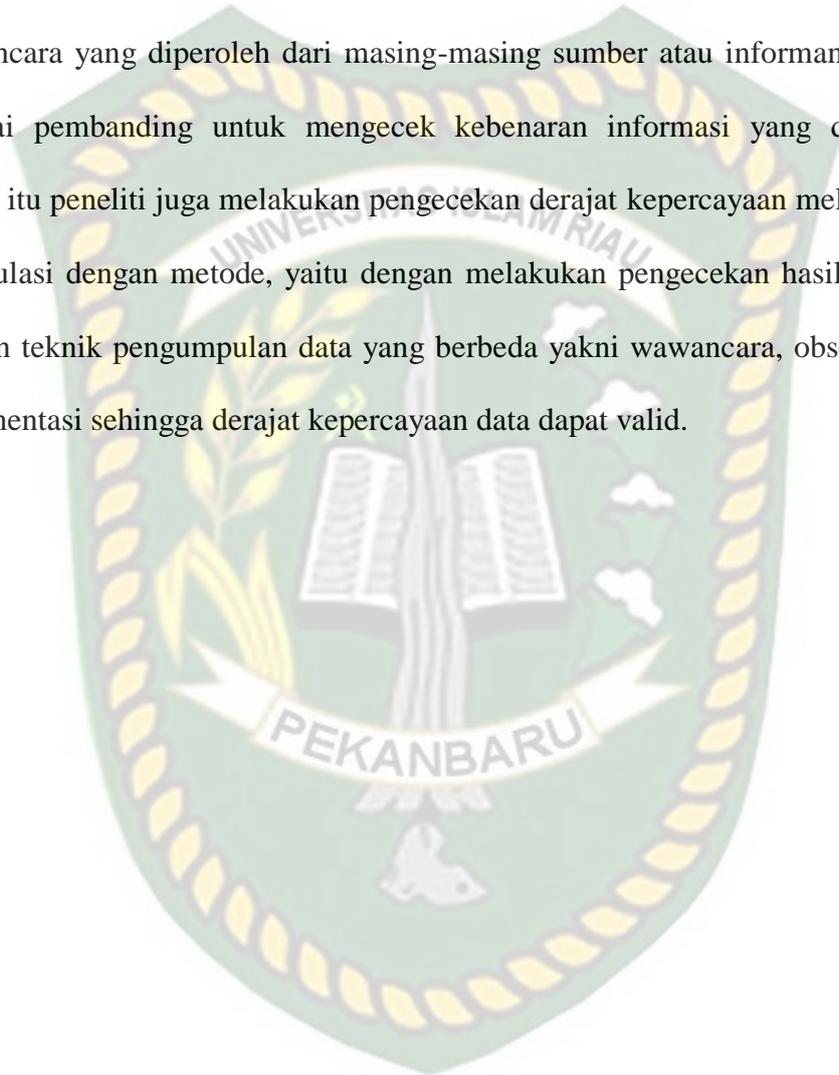
3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Sedangkan triangulasi dengan metode menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dikenal orang dengan nama “Negeri Junjungan”, sedangkan penamaan “Bengkalis” sendiri dapat diurut dari berbagai versi “Folklore” (cerita dari mulut ke mulut) yang dihimpun oleh para sejarawan yang selanjutnya dibukukan dengan beberapa judul seperti : “Kisah Pelayaran Raja Kecil ke Johor”, “Asal Muasal nama terubuk” dan “Syair ikan Terubuk”. Bengkalis sebelum dikenal orang dengan namanya sekarang, pada abad ke -16 dengan abad ke 17 Masehi atau pada masa akhir dari keruntuhan kerajaan Gasib telah dikenal dengan nama “Pulau Sembilan” yang merujuk kepada penyebutan tumpukan tanah busut (tasik) di hulu sungai Jantan (yang saat ini dikenal belakangan sebagai sungai siak). Selain itu juga para pedagang melayu pada abad itu mengenal tanah tersebut dengan nama “Kuala Batanghari” yang merujuk kepada tanah dimuara sungai.

Sejarah penamaan “Bengkalis” sendiri bermula dari akhir perjalanan panjang pelarian raja kecil sang pendiri kerajaan siak menghilir sungai jantan bersama pengikutnya dari tanah Melaka setelah sempat bermukim sementara dalam perlindungan kerajaan pagaruyung untuk membangun kembali kekuatan dalam rangka merebut hak atas tahtanya. Pada saat itu, Kuala Batanghari selain merupakan kampung nelayan juga sebagai tempat singgah sementara (Transit) kapal – kapal pedagang yang mengarungi selat Malakadari berbagai tempat seperti: Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Jawa, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan Minangkabau yang mengambil

kebutuhan kapal termasuk ikan terubuk yang menjadi tangkapan utama masyarakat pulau sebelum melanjutkan perjalannya .

Kedatangan Raja Kecil bersama pengikutnya disambut oleh Datuk Bandar Pulau Bengkalis bersama pejabatnya. Maksud dari persinggahannya tersebut, Raja Kecil ingin membangun kekuatan baru yang akan dipusatkan di Pulau Bengkalis, namun atas saran dan pertimbangan para pembesar yang hadir pada waktu musyawarah berlangsung menyarankan agar pusat kekuatan diletakkan di muara sungai jantan atau di Sabak Auh yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan pertama dari Kerajaan Siak sebelum akhirnya berlokasi ditempatnya sekarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Kuala

Batanghari (Bengkalis) inilah tapak awal pembentukan Kerajaan Siak. Pada masa persinggahan itulah Raja Kecil memberikan beberapa nama baru untuk hal-hal yang dijumpainya termasuk perubahan Kuala Batanghari menjadi Bengkalis yang merupakan nama dari induk ikan terubuk yang banyak terdapat di sana yang pada versi lain berasal dari asal kata “mengkalis” yang merupakan wujud kesabaran terdalam sang raja setelah tersingkir dari Malaka.

Sejarah terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, merupakan bagiandari wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Kesultanan Siak bergabung menjadi salah satu wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandaidengan pernyataan penggabungan oleh Sultan Syarif Kasim II kepada pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1946, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Bengkalis

berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U tertanggal 30 November 1948 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah ditetapkanlah 11 (sebelas) kabupaten yang salah satunya Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Bengkalis yang meliputi Kewedanaan Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Siak dan Pelalawan (kecuali Langgam).

Setelah perang kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau, namun sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang selama ini merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten

Bengkalis dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 7.773,93 km² atau sekitar 9,46% dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luas 107.932,71 km² yang mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2016 terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan. Adapun kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana dan Kecamatan Siak Kecil terletak di pesisir Pulau Sumatera serta Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau terletak di daratan Pulau Sumatera.

Tabel IV.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah	
					Km'	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	514,0	6,6
2	Bantan	Selat baru	-	23	424,4	5,5
3	Bukit batu	Sungai pakning	1	9	488,0	6,3
4	Bandar laksamana	Tenggayun	-	7	640,0	8,2
5	Siak kecil	Lubuk muda	-	17	742,2	9,6
6	Mandau	Air jamban	9	2	180,0	2,3
7	Bathin solapan	Sebanggar	-	13	757,4	9,7
8	Pinggir	Pinggir	2	8	1332,0	17,1
9	Talang muandau	Beringin	-	9	1171,0	15,1

1	2	3	4	5	6	7
10	Rupat	Batu panjang	4	12	896,3	11,5
11	Rupat utara	Tanjung medang	-	8	628,5	8,1
	Total		19	136	7773,9	100

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2020

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

VISI, MISI DAN PROGRAM KABUPATEN BENGKALIS

Visi Kabupaten Bengkalis sebagai tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 adalah

"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia"

Adapun penelaahan terhadap terhadap visi tersebut menghasilkan pokok-pokok visi sebagai berikut:

MODEL : Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam
 NEGERI penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas kemelayuan.

MAJU : Adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi priode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan pengembangan kawasan.

MAKMUR : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka dapat dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2017, penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 551.683 jiwa yang terdiri atas 283.225 jiwa penduduk laki

dan 268.458 jiwa penduduk penduduk. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 1,41 % dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,42 % dan penduduk perempuan sebesar 1,41 %. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2017 mencapai 71 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan dengan kepadatan sebesar 259 jiwa/km², sedangkan kepadatan yang terendah di Kecamatan Rupert Utara sebesar 23 jiwa/km². Pada tabel 4.3. berikut dapat dilihat jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2019.

Tabel IV.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

NO	Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Km ²	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bengkalis	514,00	6,61	79.622	14,43	155
2	Bantan	424,40	5,46	39.532	7,17	93
3	Bukit Batu	488,00	6,28	14.403	2,61	30
4	Bandar Laksamana*	640,00	8,23	18.890	3,42	30
5	Siak Kecil	742,21	9,55	20.463	3,71	28
6	Mandau	180,00	2,32	46.643	8,45	259
7	Bathin Solapan*	757,47	9,74	196.284	35,58	259

1	2	3	4	5	6	7
8	Pinggir	1.332,00	17,13	46.818	8,49	35
9	Talang Muandau*	1.171,00	15,06	41.159	7,46	35
10	Rupat	896,35	11,53	33.470	6,07	37
11	Rupat Utara	628,50	8,08	14.399	2,61	23
Total Keseluruhan		7.773,93	100	551.683	100	71

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka, 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis secara umum terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Penambahan penduduk ini terjadi karena wilayah Kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Mandau merupakan kawasan industri sehingga banyak pendatang dari luar daerah yang tertarik dan mencoba peruntungan di daerah tersebut.

Dari pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur dapat diketahui rasio beban ketergantungan penduduk di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 51,60 %. Secara umum rasio sebesar 51,60% ini menjelaskan bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menanggung secara ekonomi 48,40 % jiwa yang tidak/kurang produktif yaitu 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Dalam perspektif konsep pembangunan, rasio ketergantungan yang semakin tinggi kurang menguntungkan dibandingkan yang lebih rendah. Rasio ketergantungan yang tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 54,90 %. Pada tabel 4.4. berikut dapat dilihat perbandingan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan rasio ketergantungan Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 - 2019

No	Kelompok Umur	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	0-4	63.345	61.863	61.751
2.	5-9	59.807	57.693	58.265
3.	10-14	55.451	53.441	53.689
4.	15-19	52.842	47.853	47.985
5.	20-24	47.039	44.756	44.316
6.	25-29	46.368	47.047	47.649
7.	30-34	47.630	46.655	46.978
8.	35-39	44.728	44.901	45.127
9.	40-44	37.094	38.785	39.950
10.	45-49	28.839	31.023	32.234
11.	50-54	21.362	24.046	25.092
12.	55-59	15.271	18.092	19.127
13.	60-64	9.887	11.795	12.653
14.	65-69	6.665	7.439	7.923
15.	70-74	4.293	4.542	4.713
16.	75+	3.165	4.056	4.231
Jumlah		543.786	543.987	551.683
Rasio Ketergantungan		54,90	53,26	51,60

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

Penduduk Kabupaten Bengkalis bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku dengan suku melayu yang merupakan suku mayoritas, serta terdapat suku lainnya seperti suku Minang, Jawa, Batak, Bugis, etnis Tionghoa dan sebagainya. Begitu juga suku asli/ terasing yang masih terdapat di Kabupaten Bengkalis yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Kota Bengkalis sebagai ibukota kabupaten terkenal dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini merupakan penghasil telur ikan terubuk yang sangat disukai masyarakat sekitarnya. Kota lainnya adalah Kota Duri yang merupakan daerah penghasil minyak, selain itu kota Duri ini juga merupakan kota industri. Kota Sungai Pakning yang merupakan ibukota Kecamatan Bukit Batu merupakan kota penghubung antara Pulau Bengkalis dengan Riau Daratan.

4.2. Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada diwilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Muandau. Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang). Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 Duri.

Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli(tertua). terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah 937,47 Km. terdiri dari 15 desa/kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 229.989 jiwa, keadaan bulan September 2011. adapun potensi daerah : pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan kepala sawit), peternakan (Sapi, Kambing, Unggas), Perikanan darat dan industri makro dan mikro, perdagangan, jasa, pariwisata (sekolah gajah).

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah,dan Harapan Baru. Kemudian Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain : Desa Air Kulim, Balai Makam,

Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbang, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Dui. Suku asli di Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu.

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau yang beribu kotakan Duri berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 Km dari Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru. Duri yang luas wilayahnya 937,47 Km² berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir di selatan, Kecamatan Rantau Kopar, Rokan Hilir di sebelah barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu. Berikut ini diuraikan luas wilayah kota Duri yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.4 : Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau, 2019

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Talang Mandi	20.00	11.11
2	Harapan Baru	14.00	7.78
3	Gajah Sakti	20.00	11.11
4	Batang Serosa	6.00	3.33
5	Balik Alam	6.00	3.33
6	Duri Barat	14.00	7.78
7	Duri Timur	6.00	3.33
8	Babussalam	8.00	4.44
9	Air Jamban	50.00	27.78
10	Pematang Pudu	25.00	13.89
11	Bathin Betuah	11.00	6.11
	Jumlah	180.00	100.00

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2020

Pada era Orde Baru, Duri yang merupakan ibukota Kecamatan Mandau, dipisahkan dengan beberapa kelurahan di pinggiran kota, seperti Talang Mandi, Titian Antui, dan Balai Raja (yang terkenal dengan pusat Latihan Gajahnya), yang

akhirnya masuk ke dalam kecamatan pemekaran, yaitu Kecamatan Pinggir. Daerah yang dikenal dengan nama Sebang ini dulunya merupakan pusat ekonomi di pinggiran Duri, yang merupakan pintu masuk ke Kota Duri dari Jalan Raya Pekanbaru-Dumai.

Duri adalah salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Ladang minyak Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia. Dengan rata-rata produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari.

Selain kaya akan sumber daya minyak bumi itu, tanah yang subur juga menjadi ciri khas dari wilayah ini. Dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian berladang, dengan menanam tanaman palawija seperti kelapa sawit, kelapa, dan juga karet. dijadikan sebagai lahan perkebunan menjadi salah satu daya pikat yang menarik para perantau untuk menempati wilayah ini.

Penduduk di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terdiri dari berbagai etnis suku, agama, budaya dan sosial kemasyarakatan. Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Dengan demikian tingkat perkembangan penduduk sangat penting untuk diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Mandau adalah 246.185 Jiwa. Untuk lebih jelas klasifikasi jumlah penduduk Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV. 5 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Mandau, 2014-2019

Tahun	Jumlah Penduduk			Rasion Jenis Kelamin
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	
2014	118 205	110 412	228 617	107
2015	120 120	112 271	232 391	107
2016	121 974	114 058	236 513	107
2017	123 665	115 848	239 513	107
2018	125 491	117 436	242 927	107
2019	127 104	119 081	246 185	107

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2020

Jumlah penduduk yang meningkat secara tidak langsung juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan hal-hal yang tidak hanya primer, tetapi juga sangat vital bagi kehidupan manusia, yaitu air bersih. Duri merupakan daerah dataran rendah yang dikenal dengan daerah yang memiliki banyak rawa dan berlahan gambut. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh air bersih yang layak konsumsi bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

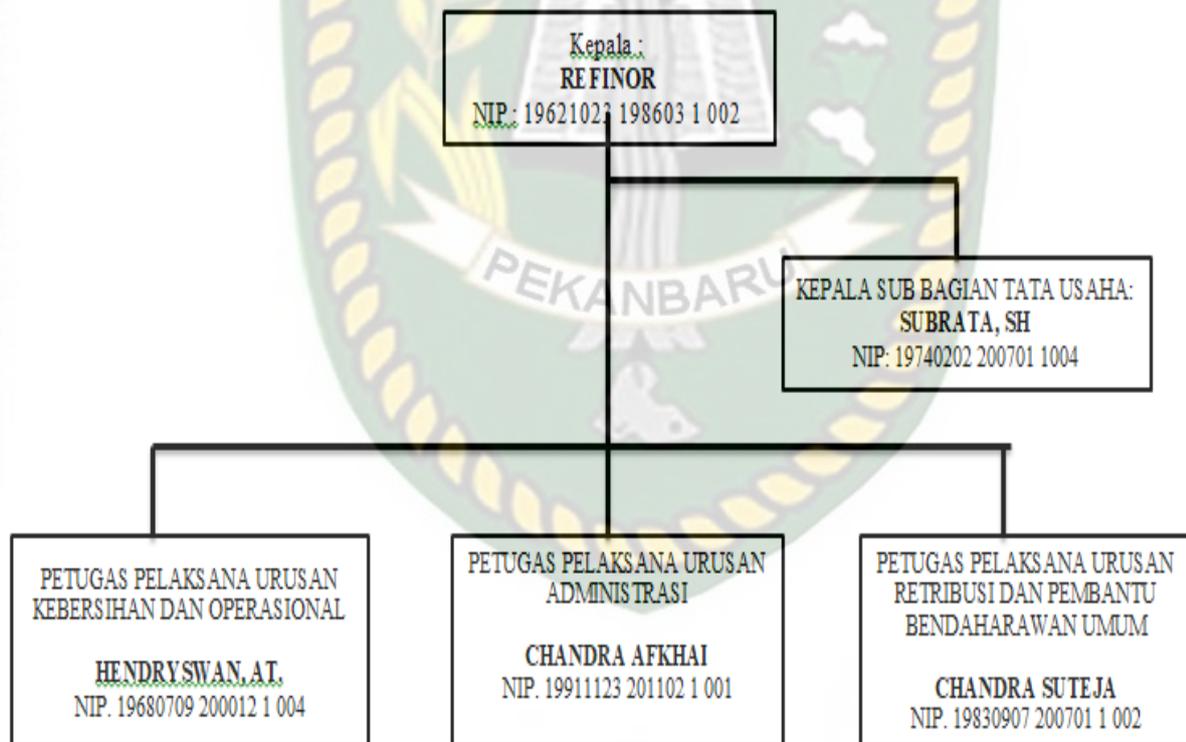
4.3. UPT Pengelola Sampah di Kecamatan Mandau

UPT Pengelola Sampah di Kecamatan Mandau adalah perpanjangan tangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Jadi UPT diberikan wewenang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis untuk mengurus kebersihan di Kecamatan Mandau khususnya. Sehingga tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis lebih mudah dan efisien karena wilayah geografis di Kabupaten Bengkalis yang luas yang menjadikan tidak memungkinkan hanya Dinas tersebut yang mengurusinya sendiri. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup mendirikan perpanjangan tangan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis untuk mempermudah kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bengkalis dan termasuklah UPT Pengelola Sampah Kecamatan Mandau ini.

UPT Pengelola Sampah merupakan unsur pelaksana operasional secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Adapun struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis



Sumber : UPT Pengelola Sampah Kecamatan Mandau, 2020

UPT Pengelola Sampah Kecamatan Mandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012. UPT Pengelola Sampah Kecamatan Mandau merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan urusan Pemerintah daerah dalam bidang Pengelolaan sampah dan Kebersihan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sampah dan Kebersihan.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup melaksanakan tugas yang telah dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi UPT Dinas Lingkungan Hidup

Terwujudnya lingkungan hidup yang tertib, bersih, sehat, indah dan nyaman sebagai pusat perdagangan menuju masyarakat madani tertib, sehat, indah dan nyaman menggambarkan kondisi prasarana yang dapat melayani kebutuhan masyarakat (Pelayanan publik untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup). Adanya kota dan pasar yang tertib bersih, sehat, indah dan

nyaman diharapkan dapat mendukung kegairahan masyarakat yang cinta akan kebersihan dan keindahan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau, sebagai aparatur Pemerintah Daerah merupakan alat pimpinan yang harus dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pemerintah yang baik dilingkungan Kabupaten Bengkalis.

Oleh karena itu, aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Bengkalis haruslah amanah, dalam arti mempunyai kemampuan dan keahlian dibidangnya, memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan memiliki integritas pribadi yang tinggi terpercaya. Dengan visi demikian diharapkan menjadi pelopor sekaligus pendorong (*change of agent*) aparatur pemerintah daerah lingkungan pemerintah kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi

Pernyataan misi merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan program instansi pemerintah untuk mencapai visi, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui alasan keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan UPT Pengelola Sampah Kecamatan Mandau. Berkaitan dengan hal tersebut, UPT Pengelola Sampah Kecamatan Mandau mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kota dan pasar yang bersih, indah dan tertib sebagai pusat perekonomian masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mensejahterakan masyarakat;
2. Menciptakan suasana kota dan pasar yang nyaman dan tertib.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan UPT merupakan pembantu bupati di bidang kebersihan, kenyamanan dan keindahan kota, yang harus dapat memberikan kontribusi dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan agar tetap pada jalur peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Melakukan koordinasi dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan merupakan bagian tak terpisahkan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Agar perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif efisiensi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merasa perlu adanya Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sampah (UPT) disetiap kecamatan untuk membantu memberi pelayanan yang baik dan memberikan layanan yang prima kepada masyarakat.

Tujuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan mempresentasikan pertanggung jawaban instansi pemerintah atas capaian kerjanya, dalam arti sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan dan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran individu/personil masyarakat terhadap pentingnya kebersihan baik dilingkungan pasar dan perkotaan;
2. Terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dan nyaman;
3. Meningkatkan PAD dalam mensejahterakan rakyat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data mengenai jenis kelamin, umur responden, dan tingkat pendidikan, Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

1. Jenis Kelamin

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin ini dibagi menjadi dua, yakni laki – laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan yang ada pada Analisis Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – laki	14	82%
2	Perempuan	3	18%
Jumlah		17	100%

Sumber : Olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel diatas pada penelitian Analisis Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis jika dilihat dari jenis kelamin laki – laki diketahui bahwa informan pada penelitian ini lebih dominan berjenis kelamin laki – laki yaitu berjumlah 14 dari 17 orang informan atau sebesar 82% sedangkan sisanya berjenis kelamin perempuan dari informan masyarakat Mandau sebesar 18%.

2. Umur Responden

Untuk mengetahui jumlah responden yang dikelompokkan berdasarkan umur dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Informan

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 30	3	18%
2	30 – 40	7	41%
3	41 – 50	5	29%
4	50 >	2	12%
	Jumlah	17	100%

Sumber : Data Olahan penulis, 2020

Berdasarkan data diatas diketahui umur responden yang berada dibawah 30 tahun adalah 3 orang dengan persentase 18%, kemudian yang berumur 30 sampai 40 tahun adalah 7 orang dengan persentase 41%, lalu dengan rentang 41 sampai 50 tahun adalah 5 orang dengan persentase 29%. Dan informan yang berusia lebih dari 50 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 12%.

3. Pendidikan responden

Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Informan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	6%
2	SLTP	3	18%
3	SLTA	7	41%
4	Strata 1 (S1)	6	35%
	Jumlah	17	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat jumlah informan berdasarkan tingkat pendidikan yang dimulai dari tingkatan SD yang berjumlah 1 orang dengan persentase 6%, SLTP 3 orang atau sebesar 18%, dan untuk pendidikan SLTA

berjumlah 7 orang atau sebesar 41%. Sedangkan informan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 berjumlah 6 orang atau sebesar 35%.

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Analisis Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Lingkungan yang bersih merupakan hal yang sangat baik untuk kesehatan dan kenyamanan dalam melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat sangat diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk membantu menjaga lingkungan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mau peduli tentang hal itu. Daerah yang padat penduduk memiliki jumlah produksi sampah yang besar setiap harinya, sampah yang dihasilkan setiap harinya harus segera ditangani dan dikelola agar tidak menimbulkan berbagai macam wabah penyakit yang dapat menyerang masyarakat yang berada dilingkungan sekitar.

Sampah merupakan sisa dari pemakaian manusia yang tidak digunakan lagi. Sampah kerap kali disangkutkan dengan istilah kotor yang dapat menimbulkan berbagai macam sumber penyakit, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sampah menjadi hal yang sangat disepelekan oleh manusia dimana masih banyak saja orang-orang yang tidak mau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Banyak masyarakat yang hanya peduli terhadap kebersihan untuk rumah yang ditinggalinya saja dan tidak mau peduli dengan keadaan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga sampah tersebut dibiarkan berserakan dan menumpuk dilingkungannya.

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi

menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia baik kota besar maupun kota kecil, belum memiliki sistem penanganan sampah yang baik (Damanhuri, 2005:1-1). Umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama yaitu metode kumpul – angkut – buang. Sebuah metode manajemen persampahan klasik yang akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan.

Sampah merupakan permasalahan yang terjadi hampir diseluruh pasar. Setiap harinya manusia melakukan kegiatan yang tidak lepas dari sampah, sisa hasil produksi yang sudah tidak diperlukan lagi atau sudah tidak dapat ditarik manfaatnya. Sampah sendiri merupakan suatu benda yang memiliki dampak bagi lingkungan, sehingga lingkungan menjadi tidak seimbang. Sampah juga akan berdampak buruk jika dibiarkan begitu saja. Sampah akan berdampak buruk bagi nilai estetika serta akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun, apabila di bakar akan menimbulkan masalah baru, yaitu polusi udara.

Sampah sendiri dibagi menurut asal zat yang di kandunginya, secara garis besar sampah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya sisa sayuran, buah-buahan dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati, misalnya plastik, kertas, kaca, kaleng dan besi. Sampah anorganik banyak yang sulit hancur dan sulit diolah. Untuk mengolah sampah ini memerlukan biaya dan teknologi tinggi.

Sampah dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat dan kerugian, bermanfaat jika dimanfaatkan dengan baik dan merugikan jika dibiarkan tanpa

ada pengelolaan yang baik. Dampak negatif dari pengelolaan pengolahan sampah yang tidak tepat akan menyebabkan beberapa kerugian. pengelolaan yang buruk mengakibatkan pencemaran baik pencemaran udara, air di dalam dan atas permukaan, tanah, serta munculnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.

Dampak terhadap kesehatan, sampah memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Dari sampah sendiri dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit apabila tidak di kelola dengan baik. Karena dengan adanya tumpukan sampah maka akan berpotensi mengundang hewan serta organisme pembawa wabah penyakit untuk berkembang biak dan berkumpul. Efek yang dapat ditimbulkan antara lain adalah timbulnya wabah penyakit seperti malaria, diare, demam berdarah, serta penyakit lainnya.

Jika sampah dikelola dan diolah dengan baik, akan menghasilkan manfaat positif bagi masyarakat. Lingkungan menjadi bersih, pencemaran dapat diminimalisir, dapat tercipta beberapa barang yang bermanfaat bagi manusia jika di daur ulang, Sampah bisa dimanfaatkan sebagai kompos untuk pupuk organik, selain itu juga bisa diolah menjadi energi bio arang, bio gas dan energi untuk listrik. Lebih jauh sampah dapat dijadikan barang-barang aksesoris, barang fungsional dan sebagai bahan bangunan.

Telah diketahui bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau, serta mengakibatkan berkembangnya penyakit. Gangguan lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, dimana penghasil sampah tidak melakukan penanganan dengan baik. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangya produksi

sampah dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan dilain pihak kemampuan pengelolaan sampah masih belum memadai.

Pengelolaan sampah yang baik harus memenuhi 3-R *reduce* (mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah), *reuse* (menggunakan kembali barang yang biasa dibuang), dan *recycle* (mendaur ulang). Kunci sukses pengelolaan sampah meliputi:

7. Kredibilitas para pengambil kebijakan.
8. Mekanisme implementasi yang efisien termasuk insentif terhadap pasar.
9. Perhatian yang signifikan terhadap pasar daur ulang.
10. Keterlibatan masyarakat.
11. Komitmen yang berkelanjutan terhadap kualitas yang tinggi terhadap semua operasi fasilitas pengelolaan sampah.
12. Evaluasi yang efektif terhadap strategi atau opsi yang dipilih.

Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan terhadap lingkungan sekitar, selain itu diperlukan juga partisipasi dan dukungan pemerintah untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan menitik beratkan terhadap masalah sampah yang telah menjadi permasalahan utama.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota – kota besar. Kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya,

sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit, sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk. Masalah sampah yang timbul di Kota Duri adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun sampah kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman penduduk, karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur akan mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk.

Jika sampah masih dianggap suatu masalah yang kecil maka kita akan merasakan dampak buruk yang ditimbulkan dari sampah. Sampah tentunya akan menimbulkan kerugian, terutama pada diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang ada disekitar kita bahwasanya kita tau efek yang ditimbulkan dari sampah diantaranya membawa banyaknya sumber penyakit, menyebabkan banjir dan menimbulkan aroma yang tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan.

Seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, akan berpengaruh pada penggunaan dan kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus melonjak sehingga produksi sampah semakin meningkat, sampah- sampah yang dihasilkan itu sendiri dapat berupa sampah rumah tangga, industri, bahkan sampah perkantoran. Dalam pengelolaan sampah di suatu daerah kerap terjadi permasalahan sehingga sampah tidak teratasi dengan baik, salah satunya di Kota Duri.

Meski pemerintah Kota Duri telah membentuk UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah namun dalam pengelolaan sampah di Kota Duri masih membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah setempat khususnya UPT Pengelolaan Sampah. Penumpukan sampah di Kota Duri kerap ditemukan hal ini diakibatkan kurangnya tempat penampungan sementara atau bak penampung sampah. Jumlah tempat pembuangan sementara yang disediakan pada saat ini hanya tersedia beberapa saja dan diletakkan pada masing-masing titik tertentu.

Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah setempat membuat masyarakat membuang sampah sembarangan kelahan kosong milik orang lain, hal ini yang menyebabkan banyak terdapat tempat pembuangan sampah ilegal yang dibuat sendiri oleh masyarakat untuk membuang sampah rumah tangganya. Selain itu masyarakat juga menggunakan badan jalan yang ada di Kota Duri untuk membuang sampah seperti di Jalang Hangtuah. Jika tidak cepat ditindak lanjuti oleh pihak – pihak terkait maka tempat pembuangan sampah ilegal itu akan semakin bertambah secara terus menerus.

Pembuangan sampah sembarangan mengakibatkan tumpukan sampah di Kota Duri tidak hanya berada dibadan jalan, dan lahan kosong bahkan tumpukan sampah berada dekat dengan lingkungan pemukiman sehingga membuat kenyamanan dan ketenangan masyarakat yang berada dekat dengan lokasi tumpukan sampah terganggu dengan bau busuk yang ditimbulkan dari tumpukan sampah. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi sampah telah menyediakan armada pengangkut sampah.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengelolaan sampah pada Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dijelaskan lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Pengumpulan

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara, atau langsung ke tempat pembuangan atau pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan (Damanhuri: 2010 :72).

Menurut Damanhuri (2010:72) operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau ke lokasi pembuangan akhir, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (*door to door*), atau secara tidak langsung (dengan menggunakan Transfer Depo/Container) sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS), dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Secara Langsung (*door to door*)

Pada sistem ini proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan. Sampah dari tiap-tiap sumber akan diambil, dikumpulkan dan

langsung diangkut ke tempat pemrosesan, atau ke tempat pembuangan akhir. Kegiatan pengumpulan sampah dari rumah – rumah sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui kegiatan pemindahan.

Pola individual langsung (*door to door*) adalah kegiatan pengambilan sampah dari rumah – rumah atau sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pemrosesan akhir tanpa melalui kegiatan pemindahan, dengan persyaratan sebagai berikut :

- d. Kondisi topografi bergelombang, hanya alat pengumpul mesin yang dapat beroperasi.
- e. Kondisi jalan yang cukup lebar dan tidak mengganggu pemakai jalan lainnya.
- f. Kondisi dan jumlah alat memadai.
- g. Jumlah timbulan sampah $>0,3 \text{ m}^3/\text{hari}$.
- h. Bagi penghuni yang beroperasi di jalan protokol.

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai sub indikator secara langsung dalam pengelolaan sampah di kecamatan Mandau, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Apakah pengumpulan sampah di Kecamatan Mandau menggunakan sistem secara langsung (*door to door*)?

Tanggapan Bapak Refinor selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau menyatakan :

“Dalam pengumpulan sampah memang mempunyai banyak cara diantaranya secara langsung diambil dari perumahan warga dan diantar ke TPA”. (Wawancara dengan Kepala UPT, 17 November 2020)

Berdasarkan tanggapan kepala UPT yang di wawancarai pada tanggal 17 November 2020 menyatakan dalam pengumpulan sampah memang dilakukan dengan banyak cara diantaranya dengan sistem ambil dirumah, namun hal ini dilakukan pada daerah sekitaran jalan protokol saja. Selanjutnya tanggapan dari Informan petugas pelaksana urusan Kebersihan dan Operasional Bapak Hendryswan yaitu sebagai berikut :

“Proses pengumpulan sampah dikecamatan Mandau dilakukan secara door to door yaitu dengan mengambil sampah ke tempat – tempat pengumpulan sementara untuk diantar ke tempat pembuangan akhir di Kecamatan Mandau” (Wawancara dengan bapak Hendryswan,17 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendry swan menyatakan bahwa proses pengumpulan sampah memang dilakukan secara door to door dan menganbil di depan rumah masyarakat. Hal serupa juga di jelaskan oleh petugas pengangkut sampah yaitu sebagai berikut :

“Kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kami mengambil sampah ditempat – tempat yang telah ditentukan dan diantar ke TPA” (wawancara bapak Rusdi 18 November 2020).

Sedangkan bapak Rusdi menyebutkan bahwa dalam proses pengumpulan sampah, pihaknya hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh bapak Zainal yang menyatakan :

“Dalam menjalankan tugas kami sudah dibagi berdasarkan rute – rute pengambilan sampah dan setiap petugas mendapatkan rute yang berbeda, dan itu hanya berada disekitaran jalan protokol tidak masuk kedalam gang kecil” (wawancara bapak Zainal, 18 November 2020).

Bapak Zainal juga menyebutkan dalam hasil wawancaranya yaitu dalam proses pengumpulan sampah memang diambil dari rumah – rumah warga, namun

dalam proses pengerjaannya petugas dibagi berdasarkan rute yang telah ditetapkan. Hal ini dibernakna oleh bapak Herman yang menyatakan :

“Petugas pengangkut sampah di Kecamatan Mandau ini hanya berjumlah 6 orang dan ini sangat kurang mengingat kecamatan Mandau sangat luas, oleh sebab itu kami hanya mengambil sampah ditempat – tempat yang telah ditentukan dan berdasarkan rute yang telah ditetapkan” (wawancara bapak Herman, 18 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman diketahui bahwa jumlah petugas yang mengambil sampah hanya 6 orang jumlah yang sedikit untuk Kecamatan yang besar sehingga pihaknya hanya mengambil sampah ditempat – tempat yang telah ditetapkan saja. Demikian juga tanggapan bapak Andi Putra yang menjelaskan :

“Kami mengambil sampah dari lokasi – lokasi yang sudah ditentukan dan kami langsung mengantarkan ke TPA” (wawancara bapak Andi Putra 18 November 2020).

Hasil wawancara bapak Andi Putra membenarkan tanggapan bapak Herman yang menyatakan bahwa dalam proses pengumpulan sampah hanya diambil dari tempat yang sudah ditetapkan. Begitu juga bapak Sayfrizal menyatakan :

“Kami hanya mengambil sampah dari tempat – tempat yang sudah ditentukan hasil dari sampah yang dikumpulkan warga tidak secara langsung mengambil dari rumah – rumah warga” (wawancara bapak Sayfrizal, 18 November 2020).

Tanggapan pak Sayfrizal juga dibenarkan oleh bapak Hatta menyatakan :

“Tidak secara langsung, kami hanya mengambil sampah yang sudah ditumpuk oleh warga ditempat yang sudah disediakan” (wawancara bapak Hatta, 18 November 2020).

Berdasarkan tanggapan dari petugas pengangkut sampah menyatakan bahwa petugas hanya mengambil sampah ditempat yang telah ditentukan dan

dengan rute yang telah ditetapkan, yaitu disekitaran jalan protokol di Kecamatan Mandau, untuk selanjutnya dibawa menggunakan kendaraan operasional UPT pengelolaan sampah menuju TPA yang berada di jalan Lintas Duri-Dumai Kilometer 9 Gang Suliki, Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sejak tahun 2002. Selanjutnya tanggapan dari masyarakat adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Mandau Bapak Khairul Akmal pada tanggal 19 November 2020, yang menyatakan bahwa :

“Petugas hanya mengambil sampah ditempat – tempat tertentu saja dan tidak menjangkau daerah perumahan warga sehingga dirasa proses pengumpulan sampah belum efektif terlaksana, dan masih banyak ditemukan tumpukan sampah disana - sini”.

Tanggapan yang sama juga disebutkan oleh bapak Zainuddin yang menyatakan :

“Kami sangat mengharapkan adanya perubahan rute dan penambahan petugas dalam pengelola sampah, sehingga bisa menjangkau sampai ke rumah – rumah warga, mengingat sampah ini merupakan masalah pokok dan selalu dihasilkan setiap harinya, sehingga warga kesulitan untuk membuang sampah sedangkan tempat penampungan sampah sementara sangat terbatas”.

Hasil tanggapan bapak Antoni menyatakan :

“Petugas pengangkut sampah dirasa belum efektif menjalankan tugas, masih banyak sampah – sampah yang tidak terangkut dan pengangkutan sampah hanya dilakukan di kiri – kanan badan jalan protokol saja, sedangkan ditempat –tempat lain masih banyak ditemukan penumpukan sampah rumah tangga”

Selanjutnya tanggapan dari Ibu Fatimah, yang menyatakan bahwa :

“Kami merasa petugas belum efektif menjalankan tugas, masih banyak sampah yang berserakan”.

Tanggapan yang sama juga disebutkan oleh ibu Ummiati yang menyatakan :

“Petugas seharusnya tidak mengambil sampah ditempat yang ada, namun lebih bisa menjangkau ke perumahan, karena tidak semua orang bisa mengantarkan sampah ke tempat tersebut”.

Berdasarkan tanggapan ibu Ummiati yang mengharapkan petugas mengambil sampah sampai ke perumahan warga, karena lokasi TPS cukup jauh dari perumahan warga sehingga masih banyak sampah yang menumpuk di sekitaran perumahan warga. Hal ini dibernarkan oleh bapak Nirwanto yang menyatakan :

“Kami menilai kinerja petugas pengangkut sampah belum optimal, masih banyak sampah – sampah yang tidak diangkat dan dibiarkan begitu saja bahkan dalam waktu yang cukup lama”

Ibu Herawati pada tanggal 19 November 2020, juga menambahkan :

“Proses pemungutan sampah tidak secara langsung dilakukan, hanya mengambil dari tempat sampah yang sudah dikumpulkan”.

Kemudian tanggapan yang sama juga disebutkan oleh bapak Raflijon yang menyatakan :

“Petugas pengangkut sampah belum efektif menjalankan tugas, masih banyak sampah yang berserakan bahkan di badan – badan jalan protokol”.

Begitu juga bapak Romi Kurniadi menyatakan :

“Petugas pengangkut sampah dirasa belum efektif menjalankan tugas, masih banyak sampah – sampah yang tidak terangkut dan pengangkutan sampah hanya dilakukan di kiri – kanan badan jalan protokol saja, sedangkan ditempat –tempat lain masih banyak ditemukan penumpukan sampah rumah tangga”

Berdasarkan tanggapan dari masyarakat tersebut menjelaskan bahwa petugas tidak langsung mengambil sampah dari rumah – rumah warga. Petugas hanya mengambil sampah ditempat – tempat yang telah ditentukan. Namun kinerja petugas dirasa belum efektif hal ini dilihat dari masih banyaknya sampah

yang berserakan bahkan dibadan – badan jalan protokol dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Pengumpulan sampah dengan metode individual langsung yaitu, dilakukan oleh petugas kebersihan dengan jalan mendatangi tiap-tiap sumber (*door to door*) dan langsung diangkut untuk dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA). Metode individual langsung biasanya melayani sumber sampah yang berada disekitar jalan arteri primer dan kolektor primer. Adapun peralatan yang digunakan adalah mobil dump truck bak sampah.

2. Secara Tidak Langsung (*Communal*)

Pada sistem ini, sebelum diangkut ke tempat pemrosesan, atau ke tempat pembuangan akhir, sampah dari masing-masing sumber akan dikumpulkan dahulu oleh sarana pengumpul seperti dalam gerobak tangan (*hand cart*) dan diangkut ke TPS. Tempat penampungan sementara merupakan suatu bangunan atau tempat yang digunakan untuk memindahkan sampah dari gerobak tangan (*hand cart*) ke landasan, kontainer atau langsung ke truk pengangkut sampah (Damanhuri: 2010:73).

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai sub indikator secara tidak langsung dalam pengelolaan sampah di kecamatan Mandau, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Apakah pengumpulan sampah di Kecamatan Mandau menggunakan sistem secara tidak langsung (*communal*)?

Tanggapan Bapak Refinor selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau menyatakan :

“Kami melihat petugas tidak secara langsung mengambil dari rumah – rumah warga dengan menggunakan alat apapun itu, namun hanya mengambil dari tempat yang telah disediakan”. (Wawancara dengan Kepala UPT, 17 November 2020)

Berdasarkan tanggapan Kepala UPT menyatakan bahwa petugas pengumpul sampah mengambil sampah dari tempat yang sudah ditetapkan, dikarenakan jumlah petugas yang masih sedikit dan luasnya daerah yang akan dilalui, jadi diharapkan partisipasi masyarakat untuk membuang sampah ditempat yang ditentukan sehingga memudahkan kinerja petugas dalam mengambil sampah. Selanjutnya tanggapan dari Informan petugas pelaksana urusan Kebersihan dan Operasional Bapak Hendryswan yaitu sebagai berikut :

“Kami mengharapkan peran aktif petugas kebersihan untuk membersihkan sampah dan jeli melihat apabila ada sampah yang berserakan untuk segera dibuang di tempat pembuangan sampah” (Wawancara dengan bapak Hendryswan, 17 November 2020)

Hal serupa juga di jelaskan oleh petugas pengangkut sampah yaitu sebagai berikut:

“Kami hanya menjalankan tugas seperti biasa dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan” (wawancara bapak Rusdi 18 November 2020).

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh bapak Zainal yang menyatakan :

“Ya, tapi tidak selalu, mengingat luasnya daerah yang akan kami jalani, sehigga kami mengharapkan warga untuk mengumpulkan sampah yang ada sehingga kami hanya mengangkutnya saja lagi” (wawancara bapak Zainal, 18 November 2020).

Hasil wawancara dengan bapak Herman yang menyatakan :

“Sesekali kami melakukan hal tersebut, namun karena kami dikejar waktu jadi kami tidak bisa melakukan it uterus menerus” (wawancara bapak Herman, 18 November 2020).

Demikian juga tanggapan bapak Andi Putra yang menjelaskan :

“Kami mengambil sampah dari lokasi – lokasi yang sudah ditentukan dan kami langsung mengantarkan ke TPA” (wawancara bapak Andi Putra 18 November 2020).

Namun bapak Sayfrizal menyatakan :

“Kami hanya mengambil sampah dari tempat – tempat yang sudah ditentukan hasil dari sampah yang dikumpulkan warga tidak secara langsung mengambil dari rumah – rumah warga” (wawancara bapak Sayfrizal, 18 November 2020).

Sedangkan bapak Hatta menyatakan :

“Tidak secara langsung, kami hanya mengambil sampah yang sudah ditumpuk oleh warga ditempat yang sudah disediakan” (wawancara bapak Hatta, 18 November 2020).

Berdasarkan tanggapan dari petugas pengangkut sampah menyatakan bahwa petugas tidak mungkin mengambil sampah dari rumah warga satu persatu, mengingat luasnya wilayah yang akan dijalani dan keterbatasan sumberdaya yang ada sehingga petugas hanya mengambil dari tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya tanggapan dari masyarakat adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Mandau Bapak Khairul Akmal pada tanggal 19 November 2020, yang menyatakan bahwa :

“Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Petugas hanya mengambil sampah ditempat – tempat tertentu saja dan tidak menjangkau daerah perumahan warga sehingga dirasa proses pengumpulan sampah belum efektif terlaksana, dan masih banyak ditemukan tumpukan sampah disana - sini”.

Tanggapan yang sama juga disebutkan oleh bapak Zainuddin yang menyatakan :

“Kami mengerti banyaknya kerja petugas kebersihan namun kami juga menyarakan agar lebih fokus dalam bekerja, agar tidak ada lagi sampah yang berserakan dibadan jalan”.

Hasil tanggapan bapak Antoni menyatakan :

“sepetinya tidak, karna hanya mengambil dari tempat tertentu saja”

Selanjutnya tanggapan dari Ibu Fatimah, yang menyatakan bahwa :

“Kemungkinan iya, petugas bekerja secara tidak langsung dan hanya mengambil sampah dari tempat sampah saja”.

Tanggapan yang sama juga disebutkan oleh ibu Ummiati yang menyatakan :

“Petugas seharusnya tidak mengambil sampah ditempat yang ada, namun lebih bisa menjangkau ke perumahan, karena tidak semua orang bisa mengantarkan sampah ke tempat tersebut”.

Bapak Nirwanto juga menambahkan :

“Kami menilai kinerja petugas pengangkut sampah belum optimal, masih banyak sampah – sampah yang tidak diangkut dan dibiarkan begitu saja bahkan dalam waktu yang cukup lama”

Ibu Herawati pada tanggal 19 November 2020, juga menambahkan :

“Proses pemungutan sampah tidak secara langsung dilakukan, hanya mengambil dari tempat sampah yang sudah dikumpulkan”.

Tanggapan yang sama juga disebutkan oleh bapak Raflijon yang menyatakan :

“Petugas pengangkut sampah belum efektif menjalankan tugas, masih banyak sampah yang berserakan bahkan di badan – badan jalan protokol”.

Begitu juga bapak Romi Kurniadi menyatakan :

“Petugas pengangkut sampah dirasa belum efektif menjalankan tugas, masih banyak sampah – sampah yang tidak terangkut dan pengangkutan sampah hanya dilakukan di kiri – kanan badan jalan protokol saja, sedangkan ditempat –tempat lain masih banyak ditemukan penumpukan sampah rumah tangga”

Berdasarkan tanggapan dari masyarakat menyatakan bahwa petugas pengangkut sampah tidak menggunakan metode tidak langsung, dikarenakan bukan petugas yang mengambil sampah dari rumah warga namun hanya mengambil dari tempat yang sudah dikumpulkan warga saja. Namun hal ini juga belum dilaksanakan secara maksimal, masih banyak sampah yang berserakan di badan – badan jalan yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan tersebut.

Pengumpulan sampah dengan metode individual tidak langsung merupakan metode pengumpulan sampah yang dilakukan warga atau petugas kebersihan yang mendatangi tiaptiap sumber sampah (*door to door*) dan diangkut ke tempat penampung sementara atau Transfer Depo (stasiun pemindahan) sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Metode ini melayani sumber sampah yang berada disetiap jalan arteri sekunder . Adapun peralatan yang dipergunakan berupa mobil dump truck bak sampah dan mobil arm roll 8 M sampai dengan 10 M.

3. Bak komunal

Bak komunal yang dibangun permanen dan terletak di pinggir jalan Hal yang harus diperhatikan adalah waktu pengumpulan dan frekuensi pengumpulan. Sebaiknya waktu pengumpulan sampah adalah saat dimana aktivitas masyarakat tidak begitu padat, misalnya pagi hingga siang hari. Frekuensi pengumpulan sampah menentukan banyaknya sampah yang dapat dikumpulkan dan diangkut perhari. Semakin besar frekuensi pengumpulan sampah, semakin banyak volume sampah yang dikumpulkan per service per kapita.

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai sub indikator bak komunal dalam pengelolaan sampah di kecamatan Mandau, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Apakah pengumpulan sampah di Kecamatan Mandau menggunakan sistem Bak Komunal?

Tanggapan Bapak Refinor selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau menyatakan :

“Iya, di Kecamatan Mandau sudah tersedia 11 Bak Komunal yang dijadikan tempat penampungan sampah sementara, namun kami merasa bahwa tempat penampungan sampah belum belum mencukupi untuk menampung jumlah sampah di Kecamatan Mandau, sebaiknya setiap kelurahan memiliki minimal 2 bak komunal sehingga tidak ada lagi sampah yang berserakan yang disebabkan bak yang tersedia sudah penuh”. (Wawancara dengan Kepala UPT, 17 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Reflinoor selaku Kepala UPT menyatakan bahwa jumlah bak komunal yang tersedia belum memadai dan mampu menampung volume sampah masyarakat. Seharusnya ada minimal 2 bak komunal disetiap Kelurahan / desa jadi di kecamatan Mandau ini minimal diperlukan 18 bak komunal yang mampu menampung jumlah sampah masyarakat. Selanjutnya tanggapan dari Informan petugas pelaksana urusan Kebersihan dan Operasional Bapak Hendryswan yaitu sebagai berikut :

“Di Kecamatan Mandau sudah tersedia bak komunal, dan petugas mengambil sampah – sampah yang sudah dikumpulkan di dalam bak tersebut.” (Wawancara dengan bapak Hendryswan, 17 November 2020)

Hal serupa juga di jelaskan oleh petugas pengangkut sampah yaitu sebagai berikut:

“Kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kami mengambil sampah ditempat – tempat yang telah ditentukan dan diantar ke TPA” (wawancara bapak Rusdi 18 November 2020).

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh bapak Zainal yang menyatakan :

“Kami hanya mengambil sampah ditempat yang telah tersedia seperti bak sampah, sesuai dengan aturan yang ditetapkan” (wawancara bapak Zainal, 18 November 2020).

Hasil wawancara dengan bapak Herman yang menyatakan :

“Ya, kami juga mengambil sampah dari bak komunal tersebut disamping dari tempat – tempat sampah yang tersedia di pinggir jalan yang kami lewati” (wawancara bapak Herman, 18 November 2020).

Demikian juga tanggapan bapak Andi Putra yang menjelaskan :

“Kami mengambil sampah dari lokasi – lokasi yang sudah ditentukan dan kami langsung mengantarkan ke TPA” (wawancara bapak Andi Putra 18 November 2020).

Namun bapak Sayfrizal menyatakan :

“Kami hanya mengambil sampah dari tempat – tempat yang sudah ditentukan hasil dari sampah yang dikumpulkan warga tidak secara langsung mengambil dari rumah – rumah warga” (wawancara bapak Sayfrizal, 18 November 2020).

Sedangkan bapak Hatta menyatakan :

“Tidak secara langsung, kami hanya mengambil sampah yang sudah ditumpuk oleh warga ditempat yang sudah disediakan” (wawancara bapak Hatta, 18 November 2020).

Berdasarkan tanggapan dari petugas pengangkut sampah menyatakan bahwa benar petugas mengambil sampah dengan sistem komunal, mengambil dan mengangkut sampah yang sudah dikumpulkan warga di tempat – tempat sampah yang tersedia. Jumlah bak komunal di Kecamatan Mandau sendiri hanya berjumlah 11 buah, sementara penduduk kecamatan Mandau sangat padat, menurut kepala UPT seharusnya disetiap kelurahan yang ada dikecamatan Mandau minimal mempunyai 2 bak komunal, sehingga bisa menjadi tempat penampungan sementara sampah sebelum diangkut oleh petugas.

Pengumpulan sampah dengan metode komunal langsung merupakan metode pengumpulan sampah yang dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah langsung ke tempat penbuangan sementara (TPS) yang telah disediakan sebelumnya atau langsung ke truck-truck sampah yang mendatangi titik pengumpulan kemudian di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun peralatan yang dipergunakan berupa mobil arm roll.

Berdasarkan tanggapan yang diberikan masyarakat, diketahui proses pengangkutan sampah belum efektif hal ini terlihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan di Kecamatan Mandau pada umumnya dan juga masih ada penumpukan sampah di tempat – tempat tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Hal ini disebabkan petugas pengangkut sampah hanya mengambil sampah ditempat tertentu saja sehingga sampah yang ada selain dari tempat yang telah ditetapkan tersebut tidak dihiraukan oleh petugas.



Gambar V.1 Sampah yg berserakan di Kecamatan Mandau

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan diketahui tanggapan dari masyarakat memang sesuai dengan kondisi dilapangan, masih banyaknya penumpukan sampah yang terlihat di daerah yang ada dikecamatan Mandau dan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sehingga diperlukannya tindakan dari UPT pengelola sampah maupun dari pemerintah kecamatan untuk menertibkan sampah – sampah yang berserakan dipermukiman masyarakat. Serta sangat diperlukannya partisipasi dari masyarakat dalam mengelola sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah ditempat yang tidak semestinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jailan Sahil pada tahun 2016 dengan judul Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggu-langan Sampah di Kelurahan Dufa – Dufa Kota Ternate dalam Jurnal BIOeduKasi Vol. 4 No. 2 Maret 2016. ISSN:2301-4678. Yang menyatakan bahwa pengumpulan sampah belum maksimal diterapkan terutama sampah rumah tangga. Aktivitas pengumpulan hanya dilakukan pada kawasan permukiman ditepi jalan dan dilengkapi TPS dimana sampah terkumpul akan dengan mudah diangkut truk sampah. Untuk kawasan permukiman padat yang sulit dijangkau truk sampah atau jauh dari lintasan truk sampah. Kondisi ini hampir dijumpai diseluruh kawasan permukiman di Kota Ternate karena sebagai kota tua yang berkarakteristik geografi pantai dan gunung. Keberadaan TPS sebagai sarana pengumpulan sampah sebelum diangkut ke TPA seringkali menjadi polemik, warga menolak penempatan TPS di depan rumah mereka. Banyak TPS yang dibangun Dinas Kebersihan Kota Ternate malah dibongkar warga. Kondisi TPS yang tidak berpenutup juga merupakan sumber bau busuk dan menjadi vektor penyakit. Jumlah container sampah masih sangat terbatas, padahal timbulan sampah pasar sangat besar. Kekurangan mobil amrol mengakibatkan container sering terlambat diangkut ke TPA. Tingkat partisipasi masyarakat rendah khususnya pengumpulan sampah. Hal ini bisa dijumpai dengan tidak adanya kelembagaan ditingkat masyarakat.

Pengumpulan dan pengangkutan sampah termasuk dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013, kegiatan Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan

fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota. Pada saat pengumpulan, sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali.

Pengumpulan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui :

1. Pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;
2. Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.

Pengumpulan sampah dari sumber sampah dilakukan sebagai berikut :

1. Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka bersekat dikerjakan sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 2(dua) hari sekali.
 - b. Masing-masing jenis sampah dimasukkan ke masing-masing bak di dalam alat pengumpul atau atur jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah.
 - c. Sampah dipindahkan sesuai dengan jenisnya ke TPS atau TPS 3R.
2. Pengumpulan sampah dengan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka tanpa sekat dikerjakan sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan sampah yang mudah terurai dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali lalu diangkut ke TPS atau TPS 3R.
 - b. Pengumpulan sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3, sampah guna ulang, sampah daur ulang, dan sampah lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan lebih dari 3 hari sekali oleh petugas RT atau RW atau oleh pihak swasta.

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara, atau langsung ke tempat pembuangan atau pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan (Damanhuri: 2010).



Gambar V.2 Bak Komunal sebagai Tempat Pengumpulan Sampah sementara di Kecamatan Mandau

Mekanisme pengelolaan sampah di Kecamatan berupa sampah-sampah yang telah di kumpulkan di beberapa TPS kemudian sampah tersebut diangkut menggunakan mobil dumbtruk kemudian sampah tersebut di bawa ke TPA, setelah sampai di TPA sampah-sampah tersebut dibiarkan dan diratakan sama alat berat, hanya sebagian yang dipergunakan untuk pembuatan kompos.

Adapun jumlah TPS yang disediakan di Kecamatan Mandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4 Data Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Mandau Tahun 2018

No	TPS	Alamat	Jumlah
1	Kawasan Sebangga	Jl. Wonosobo	1
2	Kawasan Pujasera	Jl. Zainal Abidin	1
3	Kawasan Pipa Air Bersih	Jl. Pipa Air Bersih 125	1
4	Pasar Dewi Sartika	Jl. Dewi Sartika Mandau	1
5	Pasar Mandau Raya	Jl. Jendral Sudirman	1
Jumlah			5

Sumber : UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah bak penampungan sampah yang disediakan masih sangat kurang, dimana Kota Duri memiliki Jumlah penduduk yang mencapai 248.185 jiwa dan terdiri dari 11 kelurahan atau desa, tentunya dengan jumlah yang sebanyak itu tidak seimbang dengan tempat sampah yang disediakan.

Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah setempat membuat masyarakat membuang sampah sembarangan kelahan kosong milik orang lain, hal ini yang menyebabkan banyak terdapat tempat pembuangan sampah illegal yang dibuat sendiri oleh masyarakat untuk membuang sampah rumah tangganya. Selain itu masyarakat juga menggunakan badan jalan yang ada di Kota Duri untuk membuang sampah seperti di Jalang Hangtuah. Jika tidak cepat ditindak lanjuti oleh pihak – pihak terkait maka tempat pembuangan sampah illegal itu akan semakin bertambah secara terus menerus. Oleh sebab itu perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga permasalahan sampah ini bisa diselesaikan dengan baik.

2. Pengangkutan

Pengangkutan yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan.

Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);

Menurut Damanhuri (2010:73), pengangkutan sampah adalah sub-sistem yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir, atau TPA. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut, khususnya bila:

- f. Terdapat sarana pemindahan sampah dalam skala cukup besar yang harus menangani sampah
- g. Lokasi titik tujuan sampah relatif jauh
- h. Sarana pemindahan merupakan titik pertemuan masuknya sampah dari berbagai area.
- i. Ritasi perlu diperhitungkan secara teliti
- j. Masalah lalu lintas jalur menuju titik sasaran tujuan sampah

Adapun syarat alat pengangkut sampah adalah antara lain adalah :

- f. Alat pengangkut sampah harus dilengkapi dengan penutup sampah, minimal dengan jarring
- g. Tinggi bak maksimum 1,6 m
- h. Sebaiknya ada alat ungkit
- i. Kapasitas disesuaikan dengan kondisi/ kelas jalan yang akan dilalui
- j. Bak truk/ dasar kontainer sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah.

Rute pengangkutan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013) dibuat agar pekerja dan peralatan dapat digunakan secara efektif. Pada umumnya rute pengumpulan dicoba berulang kali, karena rute tidak dapat digunakan pada semua kondisi. Pedoman yang dapat digunakan dalam membuat rute sangat tergantung dari beberapa faktor yaitu :

1. Peraturan lalu lintas yang ada;
2. Pekerja, ukuran, dan tipe alat angkut
3. Jika memungkinkan, rute dibuat mulai dan berakhir di dekat jalan utama, gunakan topografi dan kondisi fisik daerah sebagai batas rute;
4. Pada daerah berbukit, usahakan rute dimulai dari atas dan berakhir di bawah;
5. Rute dibuat agar kontainer/TPS terakhir yang akan diangkut yang terdekat ke TPA.
6. Timbulan sampah pada daerah sibuk/lalu lintas padat diangkut sepagi mungkin.
7. Daerah yang menghasilkan timbulan sampah terbanyak, diangkut lebih dahulu.
8. Daerah yang menghasilkan timbulan sampah sedikit, diusahakan terangkut dalam hari yang sama.

Pengaturan rute pengangkutan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 sangat penting dalam penanganan sampah di pemukiman karena terkait dengan penyimpanan sampah di TPS. Jika pengangkutan mengalami kendala dan tidak dapat mengangkut sampah sesuai dengan jadwal pengangkutan, maka akan terjadi penumpukan sampah di

TPS dan secara langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar TPS

Beberapa faktor yang mempengaruhi operasional pengangkutan yaitu :

1. Pola pengangkutan yang digunakan.
2. Alat angkut yang digunakan
3. Jumlah personil
4. Lokasi TPS atau TPS.

Menurut Tchobanoglous (1997), metode pengangkutan sampah diklarifikasikan menurut cara operasi ke dalam dua kategori yaitu :

1. *Hauled Container System HCS*

Hauled Container System HCS adalah sistem pengumpulan dimana container untuk menyimpan sampah diangkut (hauled) ke tempat pembuangan, dikosongkan, dan dikembalikan ke lokasi mereka semula atau beberapa lokasi lain. HCS cocok untuk pemindahan sampah dari sumber dengan tongkat penimbunan sampah tinggi karena container yang digunakan berukuran relatif besar.

Keuntungan lain dari HCS adalah *fleksibilitas container* dengan ukuran dan bentuk yang berbeda dapat disediakan untuk pengumpulan semua jenis sampah. HCS mempunyai keuntungan membutuhkan satu truk dan pengemudi untuk menyelesaikan siklus pengumpulan, masing-masing container yang diambil (pick up) membutuhkan sebuah trip keliling ke lokasi pembuangan (atau titik tujuan yang lain). Untuk itu, ukuran dan pemanfaatan (utilization) kontainer adalah besar kepentingan ekonominya. Bila sampah dapat dimampatkan (compress) dikumpulkan dan diangkut diatas jarak yang dipertimbangkan, keuntungan ekonomi dari pemadatan adalah jelas.

2. *Stationary Container System SCS*

Stationary Container System SCS adalah sistem pengumpulan dimana container menyimpan sampah tetap (remain) dititik penimbunan sampah. Pada umumnya SCS ini digunakan untuk pengumpulan semua jenis sampah. Sistemnya bervariasi tergantung pada jenis. Sistem ini biasanya digunakan untuk kontainer kecil serta alat angkut berupa truk kompaktor secara mekanis atau manual Pola pengangkutan dengan cara mekanis yaitu :

- a. Kendaraan dari pool menuju kontainer pertama, sampah dituangkan kedalam truk kompaktor dan meletakkan kembali kontainer yang kosong.
- b. Kendaraan menuju kontainer berikutnya sampai truk penuh untuk kemudian menuju TPA.
- c. Demikian seterusnya sampai rit terakhir.

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai indikator pengangkutan dalam pengelolaan sampah di kecamatan Mandau, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau?

Tanggapan Bapak Refinor selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau menyatakan :

“Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan kendaraan operasional UPT dan diantar ke TPA di jalan Lintas Duri-Dumai Kilometer 9 Gang Suliki, Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sejak tahun 2002 namun sarana dan prasarana yang digunakan pun cukup terbatas mengingat kami mengambil sampah di dua kecamatan yang mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin

Solapan, sehingga kami pun menyadari belum bisa memberikan hasil yang maksimal meskipun kami sudah bekerja dengan semaksimal mungkin". (Wawancara dengan Kepala UPT, 17 November 2020)

Selanjutnya tanggapan dari Informan petugas pelaksana urusan Bapak Hendryswan yaitu sebagai berikut :

"Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai proses pengangkutan sampah menggunakan kendaraan operasional sampah dikecamatan Mandau dilakukan secara door to door yaitu dengan mengambil sampah ke tempat – tempat pengumpulan sementara untuk diantar ke tempat pembuangan akhir di Kecamatan Mandau" (Wawancara dengan bapak Hendryswan, 17 November 2020)

Tanggapan yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Chandra Afkhai yaitu :

"Proses pengangkutan sampah oleh petugas dengan menggunakan beberapa armada pengangkut sampah diKecamatan Mandau seperti mobil pikc up, Truck, becak motor dan sebagainya"(wawancara bapak Chandra Afkhai, 17 November 2020)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Chandra Suteja menyatakan :

"Dalam proses pengangkutan sampah pihak UPT menyediakan 21 armada yang digunakan untuk mengangkut sampah di Kecamatan Mandau yang beroperasi di beberapa jadwal pengangkutan". (wawancara bapak Chandra Suteja, 17 November 2020).

Berdasarkan tanggapan dari Kepala UPT dan petugas pelaksana urusan di UPT pengelola sampah di Kecamatan Mandau menyatakan bahwa proses pengangkutan sampah menggunakan kendaraan operasional atau armada pengangkut sampah yang telah disediakan oleh UPT Pengelola sampah di Kecamatan Mandau yang beroperasi pada rute yang telah ditetapkan dan dibagi dalam beberapa jadwal pengangkutan.

Pembuangan sampah sembarangan mengakibatkan tumpukan sampah di Kota Duri tidak hanya berada dibadan jalan, dan lahan kosong bahkan tumpukan sampah berada dekat dengan lingkungan pemukiman sehingga membuat

kenyamanan dan ketenangan masyarakat yang berada dekat dengan lokasi tumpukan sampah terganggu dengan bau busuk yang ditimbulkan dari tumpukan sampah. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi sampah telah menyediakan armada pengangkut sampah. Berikut jumlah armada pengangkut sampah yang berada di Kota Duri:

Tabel V.5 Data Armada Pengangkut Sampah yang berada di Kota Duri Kecamatan Mandau

No	Nama dan Jenis Kendaraan	Kapasitas (m ³)	Kondisi	Jumlah kendaraan
1	Navara (pick up)	-	Baik	1
2	Hilux (pick up)	-	Baik	3
3	Phanter (pick up)	-	Baik	1
4	Toyota Dyna (Dump Truck)	7 m ³	Baik	4
5	Hyundai (Dump Truck)	7 m ³	Baik	1
6	Hino (Dump Truck)	7 m ³	Baik	1
7	Toyota Dyna (Amroll)	5 m ³	Baik	4
8	Hilux	3 m ³	Baik	2
9	Triseda (Becak Motor)	1 m ³	Baik	3
10	Bulldozer	-	Baik	1
	Total			21

Sumber : UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Armada yang disediakan sebanyak 21 Armada pengangkut sampah yang beroperasi dan dibagi dalam beberapa jadwal pengangkutan, namun dengan jumlah armada yang disediakan masih belum mampu mengangkat tumpukan sampah yang berada di sekitar lingkungan pemukiman di Kota Duri terutama pada tempat tumpukan sampah ilegal yang dibuat oleh masyarakat.



Gambar V.3 Armada pengangkut sampah di Kecamatan Mandau

Berikut ini penjelasan dari petugas pengangkut sampah yaitu sebagai berikut :

Bagaimanakah proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau?

“Untuk mengangkut sampah ke TPA menggunakan armada pengangkut sampah yang sudah disiapkan” (wawancara bapak Rusdi 18 November 2020).

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh bapak Zainal yang menyatakan :

“Memang dalam mengangkut sampah pemerintah sudah menyediakan armada yang dioperasikan dalam pengangkutan sampah ke TPA, namun jumlah tersebut belum mencukupi mengingat kami juga mengambil sampah di Kecamatan Bathin Solapan” (wawancara bapak Zainal, 18 November 2020).

Hasil wawancara dengan bapak Herman yang menyatakan :

“Proses pengangkutan sampah menggunakan beberapa armada sampah yang sudah disiapkan dan dengan rute – rute yang telah ditetapkan sehingga kami hanya mengambil sampah sesuai dengan rute tersebut saja” (wawancara bapak Herman, 18 November 2020).

Demikian juga tanggapan bapak Andi Putra yang menjelaskan :

“Proses pengangkutan sampah kami lakukan 4 kali sehari dengan rute yang berbeda - beda” (wawancara bapak Andi Putra 18 November 2020).

Namun bapak Sayfrizal menyatakan :

“Dalam mengambil sampah untuk dibawa ke TPA kami hanya mengikuti aturan yang telah dibuat” (wawancara bapak Sayfrizal, 18 November 2020).

Sedangkan bapak Hatta menyatakan :

“Proses pengambilan dan pengangkutan diambil dari TPS yang disediakan serta sepanjang jalan protokol untuk dibawa ke TPA” (wawancara bapak Hatta, 18 November 2020).

Berdasarkan tanggapan dari petugas pengangkut sampah menyatakan bahwa petugas hanya mengambil sampah ditempat yang telah ditentukan dan dengan rute yang telah ditetapkan, yaitu disekitaran jalan protokol di Kecamatan Mandau, untuk selanjutnya dibawa menggunakan kendaraan operasional UPT pengelolaan sampah menuju TPA. Adapun jam kerja dan rute pemungutan sampah di Kota Duri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6 Jam Kerja dan Rute Pengangkutan Sampah di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

NO	NAMA PETUGAS	JAM KERJA	RUTE	KETERANGAN
1	Rusdi	14.00 Wib	Dari U- Turn masjid Jami' menuju pokok jengkol berputar arah kembali ke U-Turn Jami'	Sampah yang diambil, Trotoar Kiri – Kanan dan Median
2	Andi Putra	16.00 Wib	Dari simpang Garoga sampai ke pokok jengkol berputar arah menuju ke simpang Garoga - TPA	Sampah yang diambil Trotoar dan median kiri kanan
3	Sayfrizal	08.00 Wib	Dari simpang Garoga sampai ke pokok jengkol berputar arah menuju ke simpang Garoga - TPA	Sampah yang diambil Trotoar dan median kiri kanan
4	Herman	12.00 Wib	Dari Pokok Jengkol – Manci – Simpang Garoga	Sampah yang diambil trotoar

NO	NAMA PETUGAS	JAM KERJA	RUTE	KETERANGAN
			- TPA	dan median kiri
5	Zainal	06.00 Wib	Dari U-Turn masjid Jami' menuju pokok jengkol berputar arah menuju TPA	Sampah yang diambil trotoar kiri kanan dan median
6	Hatta	08.00 Wib	Dari pokok jengkol sampai simpang garoga berputar arah menuju pokok jengkol – TPA	Sampah yang diambil trotoar dan median kiri kanan.

Sumber : UPT Pengelolaan Sampah Kec. Mandau, 2020

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup hanya mengangkut sampah ditempat – tempat tertentu yaitu di jalan protokol kota Duri. Peran UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup seharusnya dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat seperti RW dan RT dalam menangani masalah sampah yang mengotori sekitaran pemukiman warga, serta membuat perencanaan yang lebih baik lagi agar pihak-pihak yang tergabung dapat menjalankan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa armada yang disiapkan dalam mengangkut sampah di Kecamatan Mandau sudah cukup banyak namun jumlah tersebut belum cukup untuk mengangkut sampah – sampah yang ada di Kecamatan Mandau ditambah lagi UPT pengelola sampah menaungi dua kecamatan yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Sehingga masih diperlukan penambahan armada pengangkut sampah dan juga petugas pengangkut sampah oleh UPT maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Zamzami Elamin tahun 2018 dengan judul Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa warga Desa Disanah tidak memiliki tempat sampah pribadi yang digunakan untuk membuang sampah rumah tangga setiap harinya. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari oleh warga dikumpulkan dalam kantong plastik dan dibuang ke lahan dekat tambak sebagai pembuangan terakhirnya.

Menurut UU No. 18 tahun 2008, sampah dibuang di tempat penampungan sementara (TPS) sebelum akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Tiap desa atau kelurahan hendaknya memiliki TPS untuk menampung seluruh sampah warganya agar mudah untuk dibawa ke TPA, namun di Desa Disanah tidak terdapat TPS. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya lahan dan tidak ada transportasi untuk membawa sampah ke TPA sehingga warga cenderung membuang sampah pada lahan kosong dan membakarnya.

Lingkungan Desa Disanah juga terlihat kotor karena banyak sampah yang berserakan dan terdapat kotoran hewan di sepanjang jalan desa. Hal ini sangat mengganggu orang yang lewat. Selain itu ada beberapa penjual makanan yang memiliki hewan peliharaan dan makanan yang dijualnya tidak ditutup sehingga ada peluang untuk terkontaminasi dari debu atau kotoran dari hewan. Tidak hanya itu, penjual makanan juga tidak menjaga kebersihan.

Banyak dari mereka yang membuang bungkus makanan di sekitar tempat jualan karena tidak ada tempat sampah dan tidak cuci tangan saat melayani pembeli. Para penjual ini sebenarnya mengetahui bahwa seharusnya membuang sampah pada tempatnya, namun ketidaktersediaan tempat sampah membuat

penjual ini terbiasa membuang sampah sembarangan. Warga Desa disana hanya memahami bahwa membuang sampah harus pada tempatnya namun tidak memahami bahwa tempat pembuangan sampah harus dipisahkan. Warga juga tidak mengetahui cara mengolah sampah selain dibuang dan dibakar. Pemahaman warga mengenai pengelolaan sampah masih rendah, hal ini dikarenakan lokasi desa yang terisolasi

Pemindahan dan pengangkutan sampah dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA atau TPST pada pengumpulan dengan pola individual langsung atau dari tempat pemindahan/penampungan sementara (TPS, TPS 3R, SPA) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan/pembuangan akhir (TPA/TPST). Metoda pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan.

Berdasarkan atas operasional pengelolaan sampah, maka pemindahan dan pengangkutan sampah merupakan tanggung jawab dari pemerintah kota atau kabupaten. Sedangkan pelaksana adalah pengelola kebersihan dalam suatu kawasan atau wilayah, badan usaha dan kemitraan. Sangat tergantung dari struktur organisasi di wilayah yang bersangkutan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013).

Menurut Damanhuri (2010), pengangkutan sampah adalah sub-sistem yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir, atau TPA. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan

yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut, khususnya bila:

1. Terdapat sarana pemindahan sampah dalam skala cukup besar yang harus menangani sampah
2. Lokasi titik tujuan sampah relatif jauh
3. Sarana pemindahan merupakan titik pertemuan masuknya sampah dari berbagai area.
4. Ritasi perlu diperhitungkan secara teliti
5. Masalah lalu lintas jalur menuju titik sasaran tujuan sampah

Adapun syarat alat pengangkut sampah adalah antara lain adalah :

1. Alat pengangkut sampah harus dilengkapi dengan penutup sampah, minimal dengan jarring
2. Tinggi bak maksimum 1,6 m
3. Sebaiknya ada alat unkit
4. Kapasitas disesuaikan dengan kondisi/ kelas jalan yang akan dilalui
5. Bak truk/ dasar kontainer sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah.

3. Pembuangan akhir,

Pembuangan akhir dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pengelolaan sampah menurut Kartikawan (2007:77) adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir sebagai berikut :

7. Penimbunan sampah (*solid waste generated*)

Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan (*solid waste is generated, not produced*). Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis dan kegiatannya. Idealnya, untuk mengetahui besarnya timbulan sampah yang terjadi, harus dilakukan dengan suatu studi.

Tetapi untuk keperluan praktis, telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah SK SNI S-04-1993-03 tentang Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang. Dimana besarnya timbulan sampah untuk kota sedang adalah sebesar 2,75-3,25 liter/orang/hari atau 0,7- 0,8 kg/orang/hari.

8. Penanganan di tempat (*on site handling*)

Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di tempat pembuangan. Kegiatan ini bertolak dari kondisi di mana suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi pemilahan (*shorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*).

9. Pengumpulan (*collecting*)

Pengumpulan adalah kegiatan pengumpulan sampah dan sumbernya menuju ke lokasi TPS. Umumnya dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong dan rumah-rumah menuju ke lokasi TPS.

10. Pengangkutan (*transfer and transport*)

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan sampah dan TPS menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau lokasi pembuangan akhir.

11. Pengolahan (*treatment*)

12. Pembuangan akhir

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai indikator pembuangan akhir dalam pengelolaan sampah di kecamatan Mandau, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah tempat pembuangan akhir yang disediakan oleh Pemerintah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

Tanggapan Bapak Refinor selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau menyatakan :

“Sampah rumah tangga masyarakat ditampung di Tempat Pemrosesan Akhir yang berada di Jalan Lintas Duri-Dumai Kilometer 9 Gang. Suliki, Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sejak tahun 2002 silam setiap tahunnya, volume sampah dari Kecamatan Mandau meningkat 20 persen. TPA yang memiliki luas sekitar 5 hektar memiliki waktu pemakaian kurang lebih 2,5 tahun lagi karena sudah tidak ada sisa lahan yang bisa digunakan untuk menampung sampah dari 2 kecamatan tersebut. Jumlah sampah dari 2 kecamatan tersebut setiap harinya berjumlah sekitar 144 kubik ”. (Wawancara dengan Kepala UPT, 17 November 2020)

Selanjutnya tanggapan dari Informan petugas pelaksana urusan Bapak Hendryswan yaitu sebagai berikut :

“Dikecamatan Mandau hanya mempunyai 1 TPA dan itu menampung sampah dari 2 kecamatan sehingga sekarang TPA tersebut sudah hampir penuh” (Wawancara dengan bapak Hendryswan, 17 November 2020)

Tanggapan yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Chandra Afkhai yaitu :

“Pembuangan akhir sampah dilakukan di TPA yang terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai Kilometer 9 Gang. Suliki, Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Sejak tahun 2002 silam” (wawancara bapak Chandra Afkhai, 17 November 2020)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Chandra Suteja menyatakan :

“TPA di Kecamatan Mandau sudah ada sejak tahun 2002 dan sekarang kondisinya tidak memungkinkan lagi”. (wawancara bapak Chandra Suteja, 17 November 2020).

Berdasarkan tanggapan dari Kepala UPT dan petugas pelaksana urusan di UPT pengelola sampah di Kecamatan Mandau menyatakan bahwa dikecamatan Mandau hanya mempunyai satu tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah ada sejak tahun 2002 dan terletak di Jalan Lintas Duri-Dumai Kilometer 9 Gang. Suliki, Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Saat ini kondisi TPA sudah tidak memungkinkan lagi dan diperkirakan hanya dapat bertahan 2,5 tahun lagi. Luas TPA yang ada di Kecamatan Mandau adalah 5 hektar namun TPA ini menampung sampah dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Zamzami Elamin tahun 2018 dengan judul Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa warga Desa Disanah memiliki tingkat kesadaran yang rendah mengenai kebersihan lingkungan. Hal ini dilihat dari kebiasaan membuang sampah, kondisi

lingkungan Desa Disanah dan pemahaman warga mengenai pengelolaan sampah serta keterbatasan fasilitas TPS untuk menampung sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya.

Kesadaran warga Desa Disanah terhadap kebersihan lingkungan termasuk kesadaran heteronomus. Heteronomus adalah suatu tingkat dimana kepatuhan atau kesadaran dikarenakan motivasi, orientasi atau dasar yang beragam atau berubah-ubah. Pada tingkat ini kepatuhan dan kesadaran masih rendah dikarenakan mudah berubah oleh suasana atau keadaan sekitar. Pada masyarakat Desa Disanah masih dalam tingkat heteronomus dikarenakan motivasi atau dorongan untuk menjaga kebersihan lingkungan masih mengikuti yang lain atau kelompok mayoritas namun sikap terhadap kebersihan lingkungan warga

Desa Disanah cukup baik hanya karena keterbatasan fasilitas TPS, membuat warga tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Menurut salah satu warga bahwa dulu ada iuran Rp. 1.000,- untuk pengelolaan sampah namun iuran tersebut berhenti karena tidak ada tempat penampungan sampah dan sampah hanya dibakar, tidak dibawa ke TPA. Oleh karena itu warga tidak lagi membayar iuran tersebut karena dapat membakar sampah itu sendiri, tanpa ada orang lain yang melakukan. Warga cenderung mengikuti yang lain dalam mengelola sampah sehingga seluruh warga terbiasa membakar sampah rumah tangga. Sampah tersebut biasanya dibakar di lahan kosong dekat rumah jika sudah menumpuk banyak.

Menurut Yuliyani (2013), sikap terhadap kebersihan lingkungan adalah sikap seseorang berdasarkan cara pandang atau pemahannya terhadap kebersihan lingkungan. Orang yang bersikap positif terhadap kebersihan lingkungan akan

memandang kebersihan sebagai suatu hal yang berguna untuk diusahakan dan dilindungi. Orang yang bersikap negatif pada objek tersebut akan memandang objek itu sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat serta tidak perlu diadakan dan dilindungi. Berdasarkan penelitian tersebut, warga Desa Disanah memiliki sikap positif terhadap kebersihan lingkungan karena masih memiliki upaya untuk membakar sampah tersebut walaupun pemahaman untuk mengelola sampah dengan cara lain masih belum benar.

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah Kota Bengkalis diharapkan bisa atau dapat mengatur seluruh aspek yang terkait dengan pengelolaan sampah. Bukan hanya sebatas tata cara pengelolaan seperti pengumpulan hingga pembuangan di TPA, melainkan juga tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pihak swasta, serta dalam masyarakat dalam mengelola sampah. Kemudian dalam perda tersebut juga dijelaskan bahwa semua pihak harus menyadari tentang permasalahan sampah ini, termasuk masyarakat.

Alur penanganan sampah yang diharapkan pemerintah Kota Bengkalis dalam mengimplementasikan pengelolaannya sampah dari rumah tangga diangkut oleh truk pengangkut sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan diolah kembali di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS), sisa sampah yang tidak bisa diolah diangkut kembali menggunakan truk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Alur penanganan sampah yang diharapkan belum berjalan secara efektif. Seperti yang diketahui bahwa masih terdapat di beberapa daerah seperti Kecamatan Mandau yang masih dibutuhkan perluasan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) karena berdasarkan data yang di peroleh bahwa Mandau merupakan salah satu

penghasil sampah terbanyak di Kabupaten Bengkalis dengan menghasilkan 258 m³/hari.

Jika kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPA) yang kurang memadai atau masih kurang perluasan, maka akan mengakibatkan penimbunan sampah yang semakin menumpuk. Hal ini disebabkan adanya indikasi pengelolaan sampah yang hanya diangkut kelokasi saja, kemudian hanya ditumpuk saja (open dumping), tanpa ada pengelolaan yang baik dan benar dengan pengelolaan lebih ramah lingkungan. Akibatnya, bau busuk sampah yang sangat menyengat dan juga kerumunan lalat, sudah masuk kedalam lingkungan warga yang ada disekitar TPA tersebut, hal ini sangat berpengaruh bagi kesehatan warga disekitarnya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan diketahui tanggapan dari informan memang sesuai dengan kondisi dilapangan, masih banyaknya penumpukan sampah yang terlihat di daerah yang ada dikecamatan Mandau dan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sehingga diperlukannya tindakan dari UPT pengelola sampah maupun dari pemerintah kecamatan untuk menertibkan sampah – sampah yang berserakan dipermukiman masyarakat. Serta sangat diperlukannya partisipasi dari masyarakat dalam mengelola sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah ditempat yang tidak semestinya. Armada yang disiapkan dalam mengangkut sampah di Kecamatan Mandau sudah cukup banyak namun jumlah tersebut belum cukup untuk mengangkut sampah – sampah yang ada di Kecamatan Mandau ditambah lagi UPT pengelola sampah menaungi dua kecamatan yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Sehingga masih diperlukan penambahan armada pengangkut sampah dan juga petugas

pengangkut sampah oleh UPT maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Lingkungan yang bersih merupakan hal yang sangat baik untuk kesehatan dan kenyamanan dalam melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat sangat diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk membantu menjaga lingkungan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mau peduli tentang hal itu. Daerah yang padat penduduk memiliki jumlah produksi sampah yang besar setiap harinya, sampah yang dihasilkan setiap harinya harus segera ditangani dan dikelola agar tidak menimbulkan berbagai macam wabah penyakit yang dapat menyerang masyarakat yang berada dilingkungan sekitar.

Sampah merupakan sisa dari pemakaian manusia yang tidak digunakan lagi. Sampah kerap kali disangkutkutan dengan istilah kotor yang dapat menimbulkan berbagai macam sumber penyakit, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sampah menjadi hal yang sangat disepelekan oleh manusia dimana masih banyak saja orang-orang yang tidak mau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Banyak masyarakat yang hanya peduli terhadap kebersihan untuk rumah yang ditinggalinya saja dan tidak mau peduli dengan keadaan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga sampah tersebut dibiarkan berserakan dan menumpuk dilingkungannya.

Jika sampah masih dianggap suatu masalah yang kecil maka kita akan merasakan dampak buruk yang ditimbulkan dari sampah. Sampah tentunya akan menimbulkan kerugian, terutama pada dirisendiri, keluarga, dan orang-orang yang ada disekitar kita bahwasanya kita tau efek yang ditimbulkan dari sampah

diantaranya membawa banyaknya sumber penyakit, menyebabkan banjir dan menimbulkan aroma yang tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan.

Permasalahan lain dalam pengelolaan sampah yaitu terkendala dengan peralatan yang belum lengkap sehingga sampah tidak terkelola dan mengakibatkan tumpukan sampah semakin banyak. Selain peralatan yang belum lengkap untuk pengelolaan sampah kekurangan lahan juga menjadi permasalahan dimana lahan untuk tempat pemrosesan akhir sampah yang disediakan untuk menampung jumlah sampah dari dua Kecamatan di Kota Duri, sudah tidak mampu menampung lebih banyak lagi jumlah sampah.

Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah setempat membuat masyarakat membuang sampah sembarangan kelahan kosong milik orang lain, hal ini yang menyebabkan banyak terdapat tempat pembuangan sampah ilegal yang dibuat sendiri oleh masyarakat untuk membuang sampah rumah tangganya. Selain itu masyarakat juga menggunakan badan jalan yang ada di Kota Duri untuk membuang sampah seperti di Jalan Hangtuah. Jika tidak cepat di tindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait maka tempat pembuangan sampah ilegal itu akan semakin bertambah secara terus menerus. Pembuangan sampah sembarangan mengakibatkan tumpukan sampah di Kota Duri tidak hanya berada dibadan jalan, dan lahan kosong bahkan tumpukan sampah berada dekat dengan lingkungan pemukiman sehingga membuat kenyamanan dan ketenangan masyarakat yang berada dekat dengan lokasi tumpukan sampah terganggu dengan bau busuk yang ditimbulkan dari tumpukan sampah.

Peran UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup seharusnya dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat seperti

RW dan RT dalam menangani masalah sampah yang mengotori sekitaran pemukiman warga, serta membuat perencanaan yang lebih baik lagi agar pihak-pihak yang tergabung dapat menjalankan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan upaya dengan cara mengajak masyarakat bergotong royong bersama untuk ikut serta membersihkan tumpukan sampah yang berada disekitar daerah pemukiman yang tidak dilewati oleh petugas kebersihan. Selain itu, UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup juga telah berusaha memberikan peringatan larangan pembuangan sampah sembarangan, namun peringatan tersebut tetap saja tidak dihiraukan oleh masyarakat.

Hingga saat ini permasalahan sampah yang ada di Kota Duri masih belum dapat diatasi dan dikelola dengan begitu baik. Masalah sampah tidak akan ada habisnya jika minat dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri tidak maupeduli dalam menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Sampah Oleh UPT Pengelola Sampah di Kecamatan Mandau, diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa tingkat Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sangat perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi berdasarkan indikator Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan Akhir. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan kesimpulan per indikator :

1. Pada indikator pengumpulan belum terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan di jalan dan petugas hanya mengambil sampah pada rute yang ditentukan saja dan tidak menjangkau di daerah lain, jadi banyak terdapat penumpukan sampah pada daerah yang tidak termasuk dalam rute pengambilan sampah.
2. Pada indikator Pengangkutan belum terlaksana dengan baik, disebabkan terbatasnya sumberdaya manusia yang bertugas sebagai pengangkut sampah dan juga jumlah armada yang tersedia belum mencukupi untuk mengangkut sampah yang ada di Kecamatan Mandau.

3. Sedangkan pada indikator pembuangan akhir juga belum bisa dikatakan baik dikarenakan hanya ada 1 TPA di Kecamatan Mandau yang dibuat pada tahun 2002 dan sekarang kondisinya sangat tidak memungkinkan lagi ditambah lagi TPA tersebut menampung sampah yang berasal dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan.

2. **Saran**

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada UPT pengelolaan sampah untuk menambah rute pengambilan sampah sampai ke perumahan warga dan bila perlu menambah jumlah petugas pengambil sampah serta menambah jumlah bak komunal atau tempat pengumpulan sampah sementara sehingga sampah tidak lagi berserakan di jalan maupun ditempat lain di Kecamatan Mandau.
2. Diharapkan pemerintah juga menambah jumlah armada / kendaraan operasional yang digunakan untuk mengangkut sampah sehingga dapat memuat lebih banyak sampah – sampah yang ada di Kecamatan Mandau. Serta mencari TPA baru agar tidak terjadinya kelebihan kapasitas pada TPA yang lama.
3. Pemerintah kecamatan diharapkan mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuat tempat sampah ilegal serta lebih efektif dalam mengelola sampah sehingga sampah – sampah tersebut bisa didaur ulang menjadi barang yang bisa

digunakan kembali, hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di Kecamatan Mandau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Solihin *Wahab*. (2005). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Adisasmita*, Rahardjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah,. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Alfiandra*. 2009. Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan 3R Di Kelurahan Ngaliyan. Dan Kalipancur Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro
- Akdon*. 2006. Strategic Management for Educational Management. Bandung: Alfabeta.
- Arsyad*, Azhar. 2002. Media Pembelajaran, edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta.
- Ayub, dkk. 2007. Pengelolaan Sampah Pasar Sleman. tersedia dalam : <http://ritahen.ifastnet.com/slemanok.htm>. diakses tanggal 20 Februari 2020.
- Damanhuri*, Erni. 2010. Pengelolaan Sampah. Bandung : Departemen Teknik.
- Manik, K.E.S., 2003. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Grahanida, Siladia, 2012, Skripsi : Kinerja Unit Pengolahan Sampah Kota Depok (Studi Kasus : Unit Pengolahan Sampah Kecamatan Sukmajaya), FISIP Universitas Indonesia, Depok.)
- Handayani*grat, 2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Gie*, The Liang. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty.
- Siagian, Sondang P, 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Nawawi*, Ismail. 2009. Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan. Praktek. Surabaya: PMN.
- Silalahi, Ulber, 2002. Pemahaman praktis azas-azas manajemen. Bandung: Mandar maju
- Thoha*, M. 2014. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wursanto*. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta : Andi

- Hasibuan, 2001 Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Askara
- Hasibuan*, Malayu. 2012. "Manajemen Sumber Daya manusia". Jakarta: PT Bumi. Aksara
- Hani *Handoko*, 1999, Manajemen, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta,.
- Terry, G.R . 2011. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara Wijayanti (2008)
- Solihin, Abdul Wahab, 2008. Analisis Kebijakan Pelaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharno*. 2009. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.
- Islamy*, Irfan M. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita
- Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards. Yogyakarta: YPAPI.
- Hanifah *Harsono*, 2002, Implementasi Kebijakan dan Politik, Jakarta, Rineka. Cipta.
- Setiawan*, Guntur. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syaukani*, ad all, 2004, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, *Pustaka*. Pelajar, Yogyakarta.
- Nugroho D, Riant, 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Moekijat*. 2000. Kamus Manajemen, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.
- Qalyubi*, Sihabuddin. 2007. Dasar-dasar ilmu perpustakaan dan informasi. Yogya: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan informasi
- Nugroho, Riant*. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta : *Pustaka* Belajar.
- Suharto*. Ign. 2011. Limbah Kimia dalam Pencemaran Air dan Udara. Yogyakarta: CV. Andi.
- Kartikawan*, Yudhi. 2007. Pengelolaan Persampahan. Yogyakarta: J. Lingkungan. Hidup.

Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.

Moleong, Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.

Dokumen Pendukung :

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Bengkalis No. 36 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup sekabupaten Bengkalis.

Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol 10, No. 4 Oktober 2018 : 368-375

Jailan dkk (2016) Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa – Dufa Kota Ternate. Jurnal Bioedukasi Vol 4 No. 2 Maret 2016.